



PROFIL TEMPAT TINGGAL

2018

PROVINSI JAWA TENGAH



PROFIL TEMPAT TINGGAL

2018

PROVINSI JAWA TENGAH

PROFIL TEMPAT TINGGAL

PROVINSI JAWA TENGAH 2018

ISSN : 2407-3431
No. Publikasi : 33520.1912
Katalog : 3303003.33
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 66 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Penyunting :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Gambar kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :
©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :
CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2018 merupakan salah satu topik penyajian hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data yang disajikan mencakup kondisi dan fasilitas tempat tinggal di Jawa Tengah tahun 2018.

Publikasi ini menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk sampai wilayah kabupaten/kota sehingga dapat melihat perbandingan kondisi tempat tinggal antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Dalam publikasi ini disajikan pula penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan, sehingga pengguna data dapat lebih memahami informasi yang disajikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga publikasi ini dapat disajikan, disampaikan ucapan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, Agustus 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



Sentot Bangun Widoyono, M.A

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
Infografis Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2018.....	1
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Sistematika Penyajian	4
BAB 2 METODOLOGI	5
2.1 Sumber Data	5
2.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	5
2.3 Konsep dan Definisi	6
BAB 3 KONDISI FISIK BANGUNAN	11
3.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	11
3.2 Jenis Atap Terluas	14
3.3 Jenis Dinding Terluas	16
3.4 Jenis dan Luas Lantai	18
BAB 4 FASILITAS PERUMAHAN	23
4.1 Air Minum	23
4.1.1 Sumber Air MInum	23
4.1.2 Penggunaan Fasilitas Air MInum	25
4.2 Sumber Penerangan	27
4.3 Tempat Buang Air Besar	29
4.3.1 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar	30
4.3.2 Penggunaan Kloset	33

Bab V	KESEHATAN LINGKUNGAN	39
5.1	Air Minum Layak	39
5.2	Sanitasi Layak	41
5.3	Rumah Tidak Layak Huni	42
LAMPIRAN	45
DAFTAR PUSTAKA	67

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018 47
Tabel 3.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018 48
Tabel 3.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018 50
Tabel 3.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018 51
Tabel 3.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Per Kapita Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018 53
Tabel 4.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 24
Tabel 4.2	Persentase Rumah Tangga menurut Cara Memperoleh Air Minum dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 27
Tabel 4.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 33
Tabel 4.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018 35
Tabel 4.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum, Provinsi Jawa Tengah, 2018 54

	Halaman
Tabel 4.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja, Provinsi Jawa Tengah, 2018 56
Tabel 4.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Cara memperoleh Air Minum, Provinsi Jawa Tengah, 2018 57
Tabel 4.8	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama, Provinsi Jawa Tengah, 2018 58
Tabel 4.9	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Provinsi Jawa Tengah, 2018 59
Tabel 4.10	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset, Provinsi Jawa Tengah, 2018 61
Tabel 4.11	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, Provinsi Jawa Tengah, 2018 62
Tabel 5.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018 64
Tabel 5.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018 65
Tabel 5.3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018 66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri, Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018	12
Gambar 3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018	13
Gambar 3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018	14
Gambar 3.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018	15
Gambar 3.5 Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Dinding Terluas berupa Tembok Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018	16
Gambar 3.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018	17
Gambar 3.7 Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas berupa Tanah atau Lainnya Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018	18
Gambar 3.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas, Provinsi Jawa Tengah, 2018	19
Gambar 3.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita (m ²), Provinsi Jawa Tengah, 2018	21

Gambar 4.1	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindung, dan Mata Air Terlindung Menurut Tipe Daerah dan Jarak ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja Terdekat, Provinsi Jawa Tengah, 2018	26
Gambar 4.2	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018	28
Gambar 4.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018	28
Gambar 4.4	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri dan Bersama Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018	30
Gambar 4.5	Persentase Rumah Tangga yang Tidak memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018	31
Gambar 4.6	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut Kabupaten/-Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2018	32
Gambar 4.7	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Jenis Kloset Leher Angsa Menurut Kabupaten/-Kota dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018	34
Gambar 4.8	Persentase Rumah Tangga Perkotaan dengan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Berupa Tangki Septik atau IPAL Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2018	36

	Halaman
Gambar 4.9 Persentase Rumah Tangga Perdesaan dengan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Berupa Tangki Septik atau IPAL Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2018	37
Gambar 5.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018	40
Gambar 5.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018	41
Gambar 5.3 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2016 – 2018	43

PROFIL TEMPAT TINGGAL

JAWA TENGAH, 2018

87,36%

rumah tangga memilih genteng sebagai bahan atap terluas untuk tempat tinggalnya

80,07%

rumah tangga menggunakan dinding tembok pada rumahnya

87,85%

rumah tangga punya rumah berlantai selain tanah

99,92%

rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan

41,55%

rumah tangga memilih sumur terlindung/bor/pompa untuk sumber air minum

81,13%

rumah tangga memiliki fasilitas BAB sendiri

88,17%

rumah tangga menempati rumah milik sendiri

74,19%

rumah tangga memiliki akses sanitasi layak

95,55%

rumah tangga yang ada fasilitas BAB, pakai kloset leher angsa

78,16%

rumah tangga memiliki akses air layak minum

97,41%

rumah tangga menempati rumah layak huni



1.1 Latar Belakang

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan seseorang atau rumah tangga, selain pangan dan sandang. Rumah menjadi kebutuhan dasar terkait dengan peran penting yang dimilikinya, seperti dapat melindungi dari gangguan luar dan penularan penyakit. Selain itu fungsi rumah yang tidak kalah penting adalah sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembang. Mengingat rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, maka negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kawasan perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 7 bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kondisi perumahan (karakteristik perumahan) dapat menjadi ukuran kesejahteraan suatu rumah tangga. Salah satu arah kebijakan dan strategi pada RPJMN 2015-2019 adalah pembangunan infrastruktur/prasarana dasar yang meliputi perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, dan sanitasi. Pencapaian sasaran kebijakan tersebut memerlukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program oleh berbagai sektor terkait, sehingga fokus kepada target yang sama.

Gambaran kondisi rumah juga dapat menjadi cerminan kondisi kesehatan penghuninya. Selain itu kondisi rumah juga dapat menjadi cerminan keberhasilan pembangunan perumahan serta memberi gambaran perkembangan pembangunan perumahan di suatu wilayah. Ketersediaan data statistik perumahan diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dalam membuat kebijakan mengenai perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.2 Tujuan

Publikasi Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2018 disusun guna menyajikan berbagai indikator perumahan sekaligus menggambarkan capaian pembangunan kesehatan lingkungan di Provinsi Jawa Tengah serta kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan untuk pemerintah daerah khususnya pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan perumahan. Selain itu, publikasi ini juga diharapkan sebagai bahan perencanaan bagi pihak non pemerintah, seperti pihak swasta pengembang perumahan.

1.3 Ruang Lingkup

Berbagai indikator yang diulas pada publikasi ini meliputi kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan, kesehatan lingkungan dan pengeluaran untuk perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian publikasi Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2018 terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

- Bab 1 Pendahuluan, meliputi sub bab: latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, serta sistematika penyajian publikasi.
- Bab 2 Metodologi, meliputi sub bab: sumber data yang digunakan, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta konsep dan definisi yang digunakan.
- Bab 3 Kondisi Fisik Bangunan, meliputi sub bab: status kepemilikan, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, serta jenis dan luas lantai bangunan tempat tinggal.
- Bab 4 Fasilitas Perumahan, meliputi sub bab: air minum, sumber penerangan, dan tempat buang air besar
- Bab 5 Kesehatan Lingkungan, meliputi sub bab: air minum layak, sanitasi layak dan rumah tidak layak huni

2.1 Sumber Data

Data makro mengenai perumahan dalam publikasi Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah 2018 ini bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2018. Jumlah sampel yang dicakup dalam Susenas Maret tahun 2018 sebanyak 27.520 rumah tangga sampel yang meliputi wilayah perkotaan dan perdesaan dan tersebar di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Susenas secara rutin mengumpulkan data karakteristik perumahan dalam kelompok data pokok (KOR) dan kelompok data sasaran (Modul). Pengumpulan data perumahan rinci dalam kelompok modul dilakukan sejak tahun 1986, seterusnya data modul ini dikumpulkan setiap tiga tahun. Selain itu untuk keperluan perencanaan pembangunan jangka pendek, beberapa variabel perumahan, sejak tahun 1992 juga dipantau setiap tahun melalui Susenas dalam kelompok data pokok (KOR).

Dalam Susenas 2018, data Kor (pokok) yang dikumpulkan mencakup keterangan umum ART, keterangan tempat lahir dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, keterangan sosial ekonomi lainnya, teknologi komunikasi dan informasi, serta keterangan sumber penghasilan rumah tangga. Sedangkan data mengenai keterangan perumahan rumah tangga meliputi: penguasaan tempat tinggal, jenis atap, jenis dinding, jenis dan luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, dan bahan bakar/energi utama untuk memasak.

2.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden di setiap rumah tangga terpilih. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan kepada individu, petugas pengumpul data mengusahakan untuk mewawancarai individu yang bersangkutan. Keterangan mengenai rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

Proses pengolahan data meliputi tahap perekaman data, pemeriksaan konsistensi antar-isian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi. Seluruh tahapan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahapan ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan terhadap isian yang tidak wajar, termasuk konsistensi antara satu jawaban dengan jawaban lainnya.

2.3 Konsep dan Definisi

Mengingat data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas, maka konsep dan definisi dalam publikasi ini pun menggunakan konsep dan definisi Susenas, yaitu:

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal

- Milik sendiri
- Kontrak/sewa

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati rumah tangga pada waktu pencacahan.

Status kepemilikan tempat tinggal dimana pada waktu pencacahan rumah yang ditempati oleh rumah tangga merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri

Kontrak adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Sewa adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah

	tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus-menerus tanpa batasan waktu tertentu.
• Bebas sewa	Status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
• Dinas	Status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak
• Lainnya	Misalnya rumah adat
Atap	Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga kepala rumah tangga/anggota rumah tangga yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Pada bangunan bertingkat, atap adalah bagian teratas dari bangunan tersebut
• Beton	Atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air
• Genteng	Atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat, atau fiber/polycarbonate.
• Asbes	Atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.
• Seng	Atap yang terbuat dari bahan seng, baik yang berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk juga genteng seng yang lazim disebut decrabond (seng yang dilapisi epoxy dan acrylic). Galvalum juga termasuk dalam kategori ini.
• Bambu	Tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya.
• Kayu/sirap	Atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

<ul style="list-style-type: none"> • Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia 	Atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam
<ul style="list-style-type: none"> • Lainnya 	Jenis atap selain yang tersebut di atas, misalnya kardus, kaca, dll.
Dinding	Sisi luar atau batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka bahan/jenis dinding terluas adalah bahan/jenis dinding yang bernilai lebih tinggi (kode terkecil)
<ul style="list-style-type: none"> • Tembok 	Dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam katagori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan bata merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1-1,5 meter
<ul style="list-style-type: none"> • Plesteran anyaman bambu/kawat 	Dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.
<ul style="list-style-type: none"> • Kayu/papan 	Bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang, atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Tripleks termasuk dalam kategori ini
<ul style="list-style-type: none"> • Anyaman Bambu 	Bambu yang diiris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.
<ul style="list-style-type: none"> • Batang Kayu 	Batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu
<ul style="list-style-type: none"> • Bambu 	Tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya.
<ul style="list-style-type: none"> • Lainnya 	Jenis dinding selain yang tersebut di atas seperti seng, kardus, dsb

Lantai	Bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, tanah, dan lainnya.
Luas lantai	<p>Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen), dan ruangan khusus untuk usaha, misalnya warung. Luas lantai bangunan bertingkat adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.</p> <p>Bila satu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.</p> <p>Taman yang memiliki atap menyatu dengan atap rumah (berada di dalam rumah) maupun taman yang berada di samping rumah, namun berada di bawah atap rumah dan merupakan satu kesatuan struktur maka taman dihitung luas lantainya.</p>
Sumber air minum	Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika rumah tangga menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga
<ul style="list-style-type: none"> • Air kemasan bermerk 	Air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (600 ml, 1,5 liter, 12 liter, 19 liter) dan kemasan gelas;
<ul style="list-style-type: none"> • Air isi ulang 	Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merk
<ul style="list-style-type: none"> • Leding 	Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen.

• Sumur bor/pompa	Air tanah yang cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek)
• Sumur terlindung	Sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur/perigi.
• Sumur tak terlindung	Sumur yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung.
• Mata air terlindung	Sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
• Mata air tak terlindung	Sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai tak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung atau tercemar dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci dan lainnya
• Air permukaan	Air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi
• Air hujan	Air yang berasal dari hujan
• Lainnya	Misalnya air laut yang disuling

Pemenuhan kebutuhan rumah sebagai kebutuhan pokok tersebut tidak hanya secara kuantitas saja, tetapi juga kualitas rumah itu sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

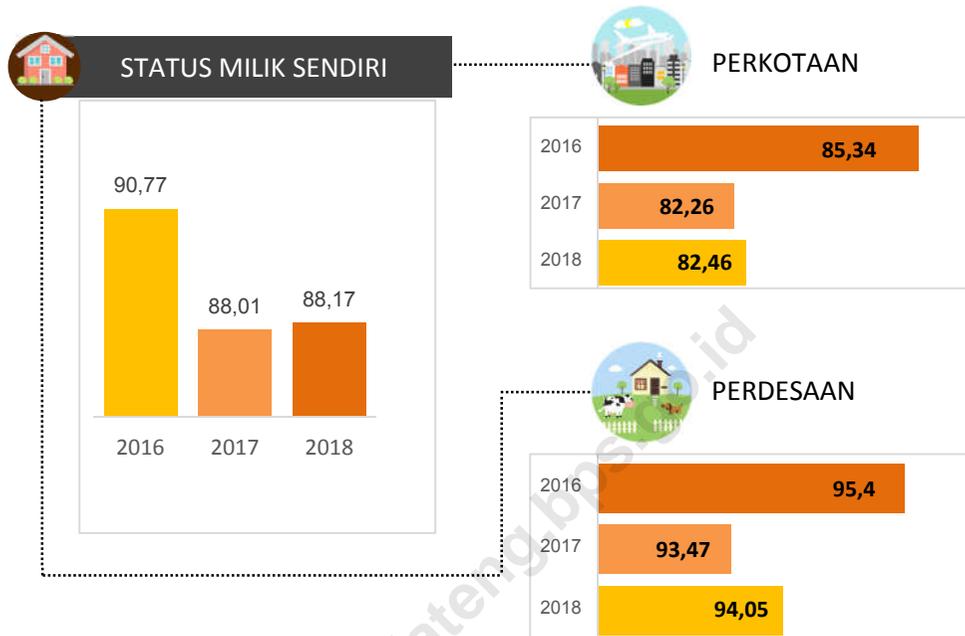
Berdasarkan fungsi rumah tersebut, status kepemilikan bangunan menjadi dasar yang perlu diperhatikan karena berpengaruh pada rasa aman terhadap keberlangsungan hidup penghuninya. Selain itu, kondisi fisik bangunan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan terkait kualitas hunian. Beberapa komponen fisik rumah yang utama adalah jenis atap, dinding, dan jenis lantai, serta luas lantai.

3.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal antar individu tidak sama, utamanya berkaitan erat dengan kondisi ekonomi. Mereka yang berpenghasilan tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki tempat tinggal dengan kondisi dan kualitas yang baik. Sebaliknya, untuk mereka yang berpenghasilan lebih rendah, atau bahkan rumah tangga miskin.

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati meliputi rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas, dan lainnya. Gambar 3.1 memperlihatkan dari tahun 2016 sampai 2018 persentase rumah tangga yang tinggal pada bangunan tempat tinggal milik sendiri cenderung menurun, yaitu dari 90,77 persen menjadi sebesar 88,17 persen. Kondisi tersebut terjadi baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan.

Gambar 3.1
Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal
Milik Sendiri, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018



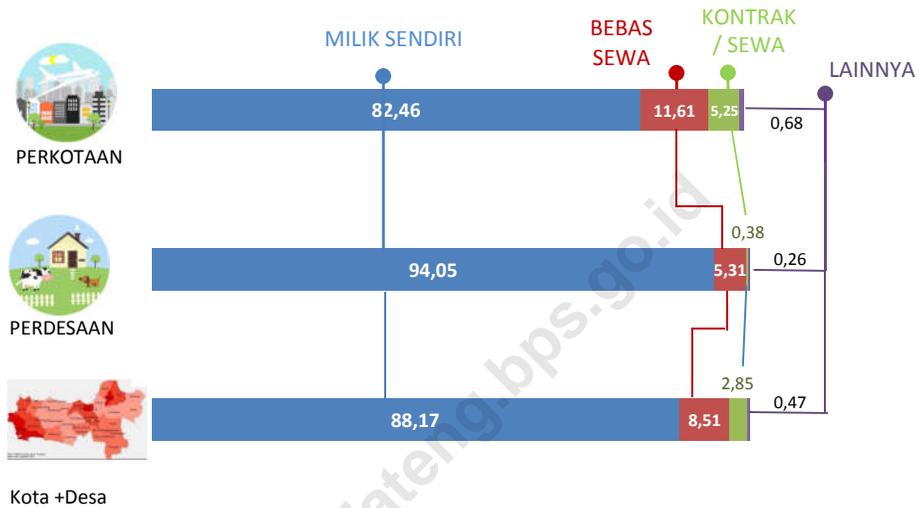
Sumber: Diolah dari Susenas: 2016, 2017, 2018

Menurut hasil Susenas 2018, sebagian besar rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah menempati rumah berstatus milik sendiri (88,17 persen), sedangkan sisanya sebesar 11,83 persen rumah tangga menempati rumah berstatus bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah berstatus bukan milik sendiri terdiri dari 2,85 persen menempati rumah berstatus kontrak/sewa, 8,51 persen menempati rumah berstatus bebas sewa dan 0,47 persen menempati rumah berstatus lainnya. Jika dibandingkan kepemilikan bangunan tempat tinggal antara perkotaan dengan perdesaan maka dapat terlihat bahwa persentase rumah tangga yang menempati rumah berstatus milik sendiri di daerah perkotaan (82,46 persen) berbeda signifikan dibandingkan dengan di daerah perdesaan yaitu 94,05 persen (Gambar 3.2).

Hal menarik yang bisa dicermati dari Gambar 3.2 adalah besarnya persentase rumah tangga di daerah perkotaan yang menempati tempat tinggal dengan status bebas sewa, tercatat sebesar 11,61 persen, berbeda signifikan dengan daerah perdesaan dengan status penguasaan tempat tinggal yang sama. Daerah perkotaan yang biasanya mempunyai fasilitas yang lebih lengkap dan sebagai pusat kegiatan ekonomi dibandingkan daerah perdesaan. Kondisi ini

berimbang pada tingginya harga tempat tinggal di daerah perkotaan dari pada daerah perdesaan, sehingga rumah tangga lebih memilih tinggal di rumah milik orang tua (status penguasaan bebas sewa).

Gambar 3.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018

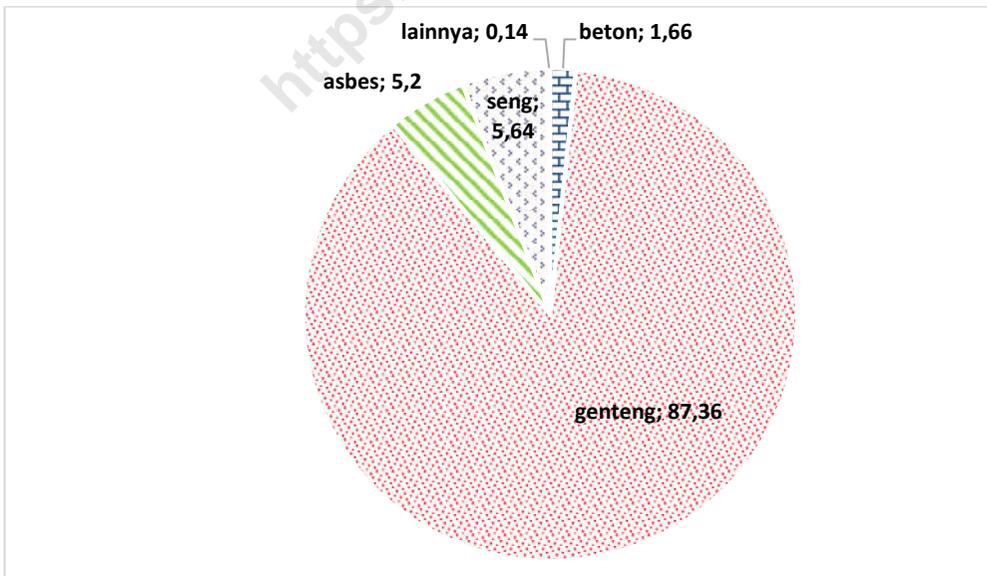
Tabel 3.1 pada lampiran memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga yang bertempat tinggal milik sendiri di wilayah kota lebih sedikit dari pada wilayah kabupaten, yaitu: Kota Surakarta (60,52 persen), Kota Magelang (60,71 persen), Kota Tegal (63,91 persen), Kota Semarang (65,00 persen), Kota Salatiga (65,41 persen), dan Kota Pekalongan (68,82 persen). Bandingkan dengan wilayah kabupaten, persentase rumah tangga dengan status bangunan tempat tinggal milik sendiri terbesar antara lain: Kabupaten Pati (95,73 persen), Kabupaten Rembang (95,71 persen) dan Kabupaten Wonogiri (95,56 persen). Sebaliknya, persentase rumah tangga dengan status tempat tinggal kontrak/sewa terbanyak terdapat di wilayah kota, yaitu Kota Salatiga (23,35 persen), Kota Surakarta (18,58 persen), Kota Magelang (17,30 persen) serta Kota Semarang (13,12 persen). Demikian halnya dengan rumah tangga dengan status penguasaan bangunan tempat tinggal bebas sewa milik orang tua, persentase terbesar terdapat di Kota Tegal yaitu mencapai 29,14 persen dari total rumah tangga dan Kota Pekalongan (26,02 persen).

3.2 Jenis Atap Terluas

Atap merupakan salah satu bagian penting dari sebuah tempat tinggal mengingat fungsinya sebagai pelindung bagi penghuni secara langsung dari cuaca yang tidak diinginkan atau kerusakan yang disebabkan oleh siraman air hujan, terpaan sinar matahari, dan tiupan angin. Oleh karena itu, disamping perancangan dan pemasangan struktur atap yang baik dan kokoh, pemilihan jenis material bahan atap juga menjadi hal yang sangat penting. Biasanya dipilih dari bahan yang mampu memberi perlindungan optimal, kuat, ringan dan kedap air.

Atap tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan dari suatu rumah tangga karena pemilihan jenis atap juga menyesuaikan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Di daerah dataran rendah, biasanya rumah tinggal memakai atap jenis genteng dengan tujuan untuk mengurangi suhu panas dalam rumah, sedangkan untuk daerah dataran tinggi, biasanya jenis atap seng banyak dipakai agar panas matahari yang diterima dapat disimpan sehingga dapat menghangatkan bagian dalam rumah. Jenis atap pada Susenas 2018 dibedakan menjadi: beton, genteng, asbes, seng, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya.

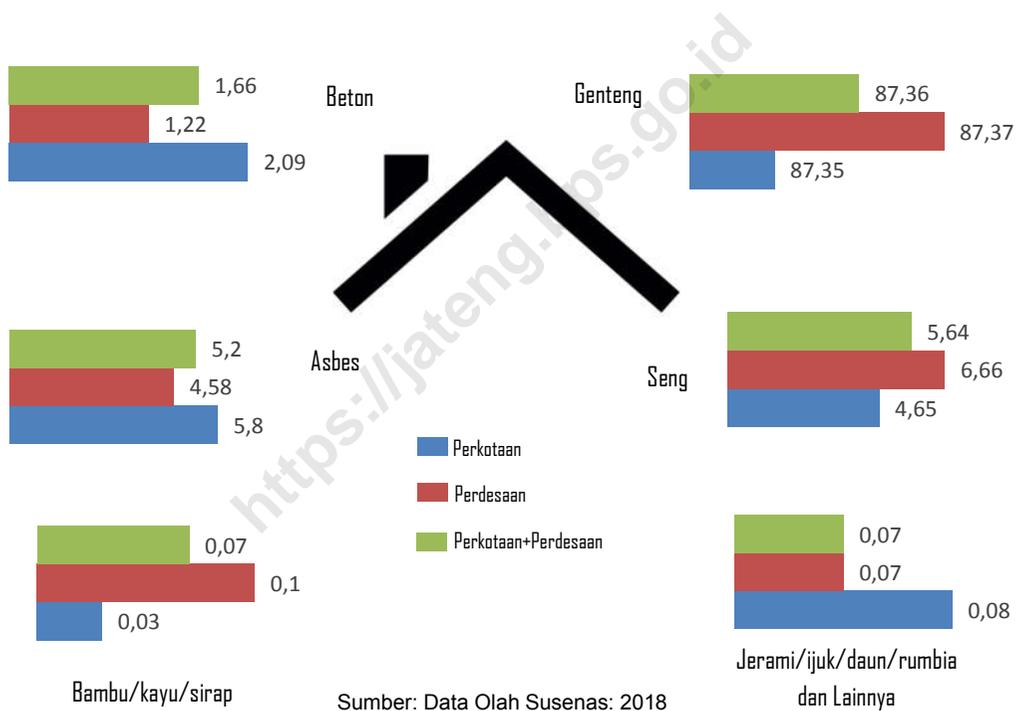
Gambar 3.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2017

Jenis atap genteng/seng/asbes masih menjadi pilihan utama penduduk dalam membuat rumah. Hasil Susenas 2018 menunjukkan mayoritas rumah tangga menggunakan jenis atap genteng (87,36 persen), asbes (5,20 persen) dan seng (5,64 persen). Hal menarik lainnya yang bisa dicermati adalah masih terdapat rumah tangga yang menggunakan jenis atap yang tergolong tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu atap berupa jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia dan lainnya yang mencapai 0,14 persen dari total rumah rumah tangga di Jawa Tengah.

Gambar 3.4
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018



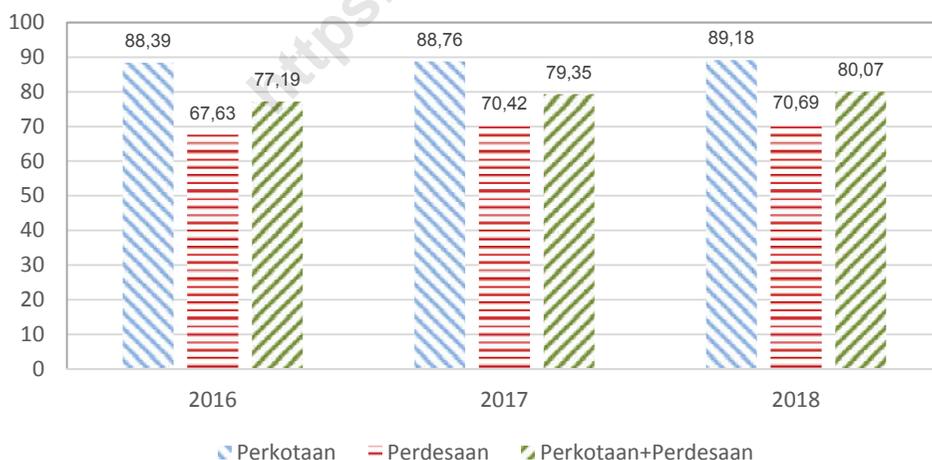
Bila diamati lebih lanjut menurut tipe daerah, penggunaan atap jenis genteng merupakan jenis atap yang paling banyak digunakan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Gambar 3.4. memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga yang tinggal dalam rumah beratap beton di perkotaan sedikit lebih tinggi dari pada daerah perdesaan yaitu 2,09 persen berbanding 1,22 persen. Sebaliknya rumah tangga di daerah perdesaan menggunakan jenis atap seng untuk atap terluas tempat tinggal mereka daripada rumah tangga di daerah perkotaan, tercatat 6,66 persen banding 4,65 persen.

Penggunaan atap jenis genteng paling banyak dipakai oleh rumah tangga di Kabupaten Blora (98,66 persen), Kabupaten Rembang (98,56 persen), Kabupaten Kudus (98,44 persen). Sedangkan di Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Wonosobo merupakan wilayah di Jawa Tengah dengan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah beratap genteng terendah, yaitu masing-masing 40,43 persen dan 45,99 persen (Lampiran, Tabel 3.2). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat rumah tangga yang menggunakan jenis atap jerami/ijuk/daun/rumbia serta jenis atap lainnya. Seperti di Kabupaten Kebumen tercatat sekitar 0,52 persen rumah tangga tinggal dalam rumah dengan jenis atap lainnya. Di Kabupaten Jepara masih terdapat sekitar 0,26 persen rumah tangga yang rumahnya berjenis atap jerami/ijuk/daun/rumbia.

3.3 Jenis Dinding Terluas

Agar memenuhi standar kesehatan, jenis dinding yang baik adalah dinding dari bahan yang kedap air sehingga terhindar dari basah dan lembab, serta tidak berlumut. Jenis bahan dinding yang kualitasnya paling baik adalah tembok.

Gambar 3.5
Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Dinding Terluas berupa Tembok Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018

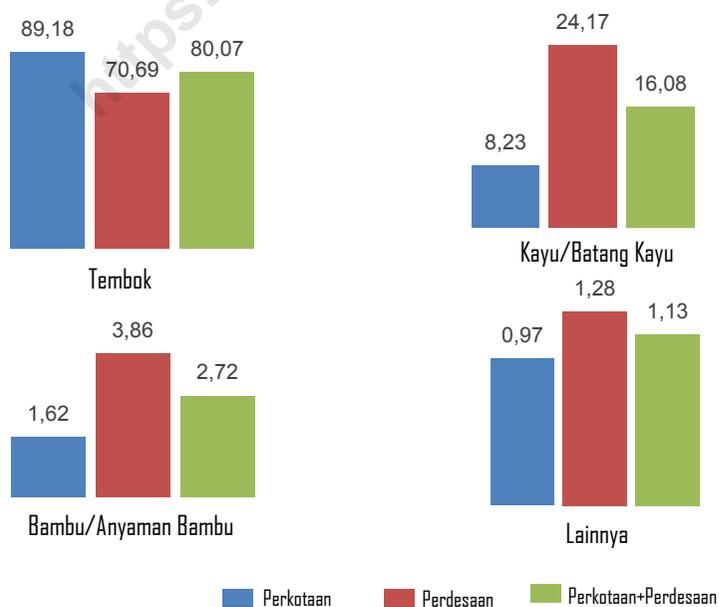


Sumber: Data Olah Susenas: 2016, 2017, 2018

Sebagian besar rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah menggunakan jenis dinding tembok. Bahkan jika dilihat persentase rumah tangga berdinding tembok selama tahun 2016 hingga 2018 cenderung meningkat. Gambar 3.5. menunjukkan persentase pada tahun 2016 adalah sebesar 77,19 persen kemudian naik menjadi 79,35 persen di tahun 2017 dan 80,07 persen pada tahun 2018. Namun demikian masih terdapat sekitar 19,93 persen rumah tangga di Jawa Tengah pada tahun 2018 yang menggunakan dinding selain tembok, sebab tidak menutup kemungkinan pada daerah tertentu masyarakat lebih cenderung memilih dinding berjenis bukan tembok untuk tempat tinggalnya, seperti menggunakan kayu, bambu dan lainnya meskipun dari segi keamanan, jenis dinding tembok lebih memberikan rasa aman dibandingkan jenis bukan tembok.

Bila dilihat menurut tipe daerah, dinding berjenis tembok lebih banyak dipakai oleh rumah tangga di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan, yaitu 89,18 persen berbanding 70,69 persen. Berbeda halnya dengan dinding jenis kayu, persentase rumah tangga di daerah perdesaan yang tinggal di rumah dengan dinding terluas jenis ini mencapai 24,17 persen, sedangkan di daerah perkotaan mencapai 8,23 persen (Gambar 3.6).

Gambar 3.6
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018



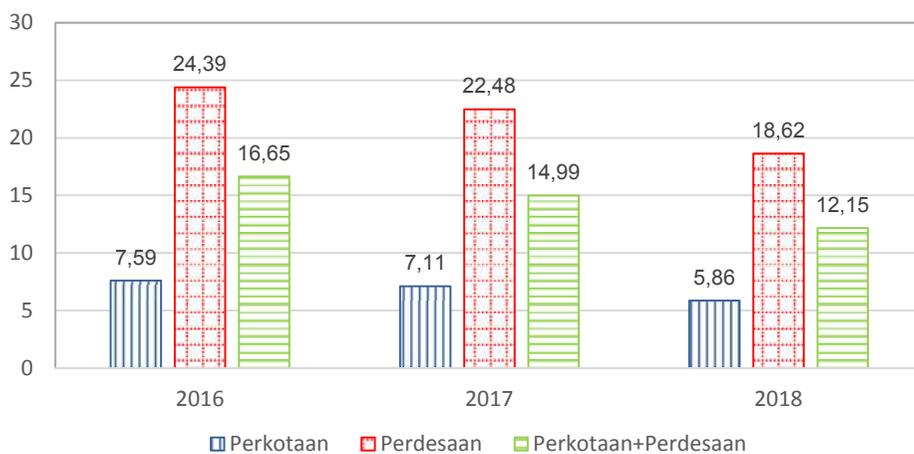
Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Tabel 3.3), Kota Tegal dan Kabupaten Klaten memiliki persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan dinding terluas jenis tembok terbesar yaitu masing-masing 99,37 persen dan 97,91 persen. Sebaliknya Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan merupakan wilayah yang memiliki persentase rumah tangga yang bertempat tinggal berdinding terluas tembok terendah, yaitu masing-masing sekitar 19,52 persen dan 20,96 persen. Namun demikian di kedua kabupaten tersebut persentase rumah tangga yang bertempat tinggal dengan dinding terluas menggunakan kayu tercatat paling tinggi di Jawa Tengah yakni 77,47 persen (Kabupaten Blora) dan 75,32 persen (Kabupaten Grobogan). Hal ini dikarenakan masyarakat di kedua kabupaten tersebut lebih menyukai menggunakan kayu sebagai dinding bangunan daripada dinding jenis tembok, selain juga didukung oleh kondisi wilayahnya yang masih relatif banyak hutan penghasil kayu.

3.4 Jenis dan Luas Lantai

Jenis lantai rumah menggambarkan kualitas. Ditinjau dari sisi kesehatan, lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibandingkan lantai tanah, bahkan rumah berlantai tanah dianggap sebagai salah satu kategori rumah tidak layak huni. Urutan dari yang paling baik untuk lantai bukan tanah menurut kualitasnya adalah keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu dan lainnya.

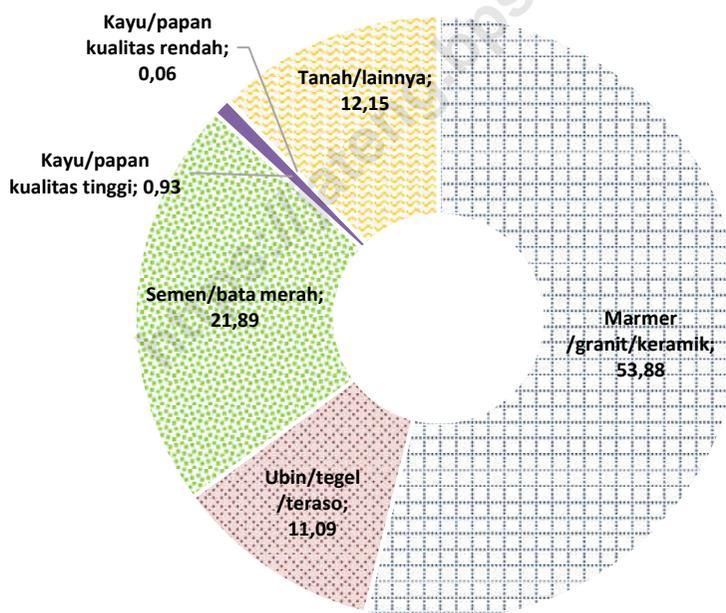
Gambar 3.7
Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas berupa Tanah atau Lainnya Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018



Sumber: Diolah dari Susenas: 2016, 2017, 2018

Berdasarkan data Susenas Maret tahun 2016 sampai 2018, persentase rumah tangga yang tinggal dengan lantai rumah terluas dari tanah dan lainnya cenderung menurun. Sebagaimana pada Gambar 3.7, persentase pada tahun 2016 sebesar 16,65 persen turun menjadi 12,15 persen di tahun 2018. Penurunan persentase rumah tangga dengan rumah berlantai tanah dan lainnya selama tahun 2016 sampai 2018 juga terjadi di daerah perkotaan maupun pedesaan. Bila di daerah perkotaan sebesar 7,59 persen pada tahun 2016 maka pada tahun 2018 turun menjadi 5,86 persen. Demikian pula untuk daerah pedesaan, bila pada tahun 2016 rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis lantai tanah dan lainnya sekitar 24,39 persen maka pada tahun 2018 turun menjadi 18,62 persen.

Gambar 3.8
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas,
Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber: Diolah dari Susenas: 2018

Jenis lantai terluas sebagian besar rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah sudah menggunakan marmer/keramik/granit yaitu sebanyak 53,88 persen, berlantai semen/bata merah sekitar 21,89 persen dan 11,09 persen menggunakan ubin/tegel/teraso. Namun demikian masih terdapat sekitar 12,15 persen rumah tangga yang bangunan tempat tinggalnya berlantai tanah (Gambar 3.8).

Kota Semarang, Kota Tegal dan Kota Pekalongan merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga yang bertempat tinggal memakai lantai jenis marmer/keramik/granit tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, yakni masing-masing mencapai 78,59 persen, 76,26 persen dan 72,86 persen. Sebaliknya persentase rumah tangga yang tinggal dalam rumah berlantai terluas jenis marmer/keramik/granit terendah adalah di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora masing-masing hanya sekitar 19,77 persen dan 21,80 persen (Tabel 3.4).

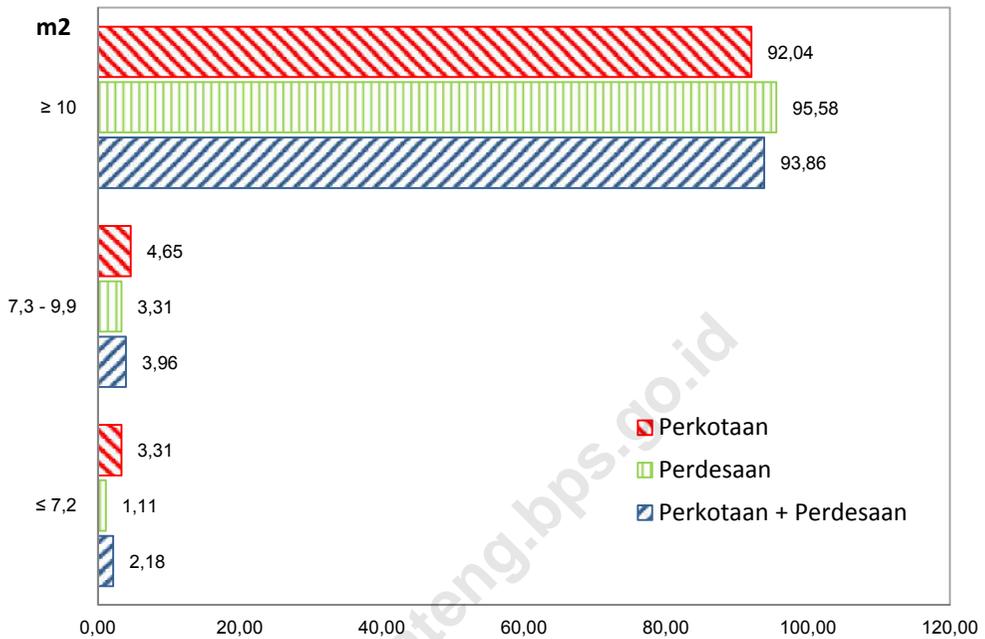
Di sisi lain masih cukup banyak rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan lantai terluas jenis tanah dan lainnya, bahkan lebih dari separuh dari total rumah tangganya, tercatat persentase terbesar berada di Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan, masing-masing mencapai 50,32 persen dan 46,48 persen. Demikian halnya untuk wilayah kota, masih terdapat rumah tangga yang tinggal dalam bangunan berlantai tanah dan lainnya, seperti Kota Pekalongan (3,31 persen), dan Kota Tegal (1,87 persen).

Selain jenis lantai, indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi rumah layak huni adalah luas lantai. Luas lantai tempat tinggal seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Secara tidak langsung, luas lantai juga berhubungan dengan sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Luas lantai erat hubungannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota rumah tangga.

Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai perkapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total penduduk.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 22 Ayat 3 menyatakan bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Jika satu bangunan rumah dengan luas lantai ini dihuni oleh 5 orang, maka luas per kapita yang dianjurkan oleh Undang-Undang ini adalah paling tidak sebesar 7,2 meter persegi. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi.

Gambar 3.9
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita (m²),
Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Gambar 3.9 menyajikan perbandingan persentase rumah tangga menurut luas lantai perkapita dan tipe daerah. Sebagian besar rumah tangga di Jawa Tengah mempunyai luas lantai perkapita 10 meter persegi atau lebih (93,86 persen). Namun demikian masih ada sekitar 2,18 persen rumah tangga yang menempati rumah yang belum memenuhi ukuran luas lantai perkapita ideal menurut Undang-Undang dan 6,14 persen yang belum memenuhi ukuran luas lantai perkapita ideal menurut klasifikasi WHO dan APHA.

Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Sragen merupakan tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal dengan luas lantai perkapita lebih dari 10 m² terbesar, yaitu masing-masing 98,53 persen, 98,39 persen dan 98,03 persen. Namun demikian masih terdapat rumah tangga yang menghuni tempat tinggal dengan luas lantai ≤ 7 m², dengan persentase terbesar berada di Kota Surakarta yaitu sekitar 14,81 persen, diikuti Kota Pekalongan (6,65 persen) dan Kota Magelang

(6,05 persen) (Tabel 3.5). Hal ini diduga rumah tangga tersebut menempati tempat tinggal dengan status kontrak/sewa.

<https://jateng.bps.go.id>

Secara harfiah rumah merupakan bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode waktu tertentu. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer dalam hidup manusia, oleh karena itu rumah sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian hidup yang mencakup banyak pengaruh, seperti pengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga yang menempati rumah tersebut atau bisa juga pengaruh terhadap status sosial ekonomi. Karena hal tersebut maka diperlukan rumah yang ideal yakni rumah yang memiliki sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut ini akan dibahas fasilitas-fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuninya. Fasilitas-fasilitas dasar tersebut adalah air minum/air bersih, sumber penerangan, dan fasilitas buang air besar.

4.1 Air Minum

Sekitar 80 persen tubuh manusia terdiri dari air, oleh karena itu kebutuhan akan cairan sangat tinggi. Kebutuhan cairan tersebut terpenuhi dengan mengkonsumsi air minum yang cukup. Selain itu, air minum yang dikonsumsi harus memenuhi standar kesehatan seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Air minum yang dimaksudkan dalam Permenkes tersebut adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

4.1.1 Sumber Air Minum

Perbedaan akses rumah tangga terhadap air minum berakibat munculnya variasi sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga. Susenas Maret 2018 mencakup variasi sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga seperti air

kemasan bermerk, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya.

Penyediaan air bersih bagi masyarakat merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun hal ini belum dapat diwujudkan, data tahun 2018 menunjukkan sebagian besar masyarakat masih mengonsumsi air yang diperoleh secara swadaya baik dengan cara membeli maupun tidak.

Sumber air minum yang berasal dari air isi ulang merupakan jenis sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga yaitu sebesar 24,33 persen. Sisanya yaitu sekitar 22,45 persen menggunakan sumur terlindung sebagai sumber utama air minum, 19,10 persen menggunakan air dari sumur bor/pompa dan 16,22 persen menggunakan air leding. Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa masih adanya rumah tangga yang menggunakan air permukaan, serta air hujan dan lainnya sebagai sumber utama air minum, tercatat masing-masing sebesar 0,29 persen dan 0,59 persen.

Tabel 4.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Minum Kemasan Bermerk/Isi Ulang	29,74	18,77	24,33
Leding	22,47	9,78	16,22
Sumur Bor/Pompa	20,76	17,39	19,10
Sumur Terlindung	20,53	24,43	22,45
Sumur tak terlindung	1,63	3,81	2,71
Mata air terlindung/tak terlindung	4,64	24,26	14,31
Air permukaan	0,18	0,41	0,29
Air hujan dan lainnya	0,05	1,15	0,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Sementara jika dilihat berdasarkan tipe daerah terdapat perbedaan, di daerah perkotaan sumber air minum utama yang banyak digunakan adalah air isi

ulang (29,74 persen), sedangkan di daerah perdesaan rumah tangga paling banyak menggunakan sumber air utama dari sumur terlindung (24,43 persen). Masyarakat perkotaan lebih memilih menggunakan air minum isi ulang karena efek dari budaya instan, praktis dan mudah mendapatkannya, selain itu masyarakat perkotaan beranggapan bahwa air minum isi ulang biasanya menggunakan mesin isi ulang yang melalui proses filterisasi sehingga air lebih bersih dan higienis dibandingkan air yang berasal dari tanah yang kemungkinan sudah tercemar jika di daerah perkotaan. Faktanya, air minum isi ulang itu cenderung tidak baik untuk kesehatan. Hal ini dikarenakan air tersebut rentan mendapat pencemaran dari kuman atau bakteri meskipun banyak penyedia air minum isi ulang mengklaim jika airnya sudah disterilisasi dan menggunakan teknologi penyaringan yang terkini. Selain itu, umumnya depo pengisian air minum isi ulang berada di pinggir jalan yang tentu akan beresiko terkena polusi, debu, dan berbagai bakteri dengan mudah. Pemerintah harus memikirkan mengenai solusi pengganti air minum isi ulang yang lebih sehat untuk masyarakat. Sebaliknya, masyarakat perdesaan yang belum terlalu terkena dampak budaya instan lebih memilih sumber air minum dari sumur terlindung. Selain itu, kemungkinan air tanah tercemar di perdesaan masih sangat kecil.

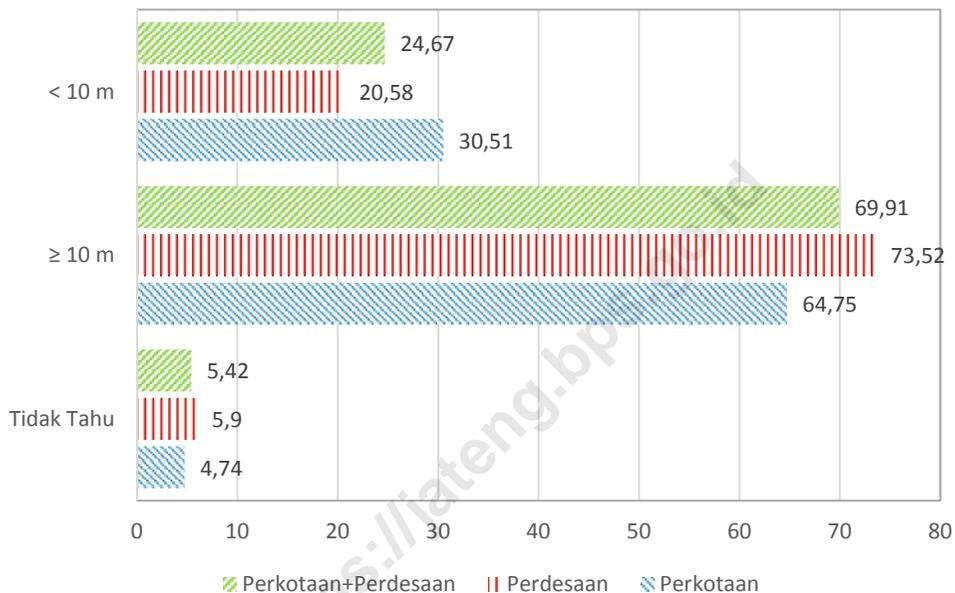
Kota Semarang merupakan wilayah di Jawa Tengah dengan persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum yaitu sebesar 64 persen (Tabel 4.5). Sebaliknya, Kabupaten Magelang merupakan wilayah dengan persentase terendah yakni hanya 1,37 persen rumah tangga yang menggunakan air minum isi ulang sebagai sumber air minum utama. Perbedaan persentase antara keduanya tergolong tinggi yaitu lebih dari 50 persen. Hal menarik lainnya adalah bahwa ada 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah dimana masih ada rumah tangga yang mengkonsumsi air permukaan sebagai sumber air utama. Rumah tangga di 11 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah mengkonsumsi air hujan, serta rumah tangga di 12 kabupaten kota yang tercatat mengkonsumsi air lainnya sebagai sumber air minum utama.

4.1.2 Penggunaan Fasilitas Air Minum

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja juga menjadi syarat ketersediaan air bersih. Menurut Kementerian Kesehatan, agar tidak mencemari sumber air minum, maka lubang penampungan tinja sebaiknya berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih. Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa sekitar 69,91 persen rumah tangga sudah memiliki sumber air minum yang berjarak 10 meter atau lebih, dari tempat

penampungan tinja terdekat. Sementara itu, rumah tangga yang tidak mengetahui jarak sumber air minumannya ke tempat penampungan tinja mencapai 5,42 persen.

Gambar 4.1
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari Sumur Bor/Pompa, Sumur Terlindungi, dan Mata Air Terlindungi Menurut Tipe Daerah dan Jarak ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja Terdekat, Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Aspek yang tidak kalah penting dalam penyediaan air minum bagi rumah tangga adalah bagaimana rumah tangga tersebut mendapatkan air minum. Air minum yang dikategorikan sebagai membeli antara lain yang bersumber dari leding PAM/PDAM/BPAM, air kemasan, atau menyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah. Sedangkan yang dikategorikan sebagai tidak membeli jika rumah tangga memperoleh air minum dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

Persentase rumah tangga di Jawa Tengah yang mendapatkan air minum dengan cara membeli (secara eceran maupun langganan) jauh lebih kecil dibanding tidak membeli, yaitu 43,87 persen dibanding 56,13 persen. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa untuk daerah perkotaan, persentase rumah tangga yang cara memperoleh air minum dengan cara membeli lebih besar dibandingkan daerah perdesaan, yaitu 52,48 persen dibanding 35,01 persen.

Tabel 4.2
Persentase Rumah Tangga menurut Cara Memperoleh Air Minum dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Cara Memperoleh Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Membeli	52,48	35,01	43,87
Tidak Membeli	47,52	64,99	56,13
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2017

Dari seluruh rumah tangga di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, rumah tangga di Kota Tegal adalah rumah tangga di wilayah yang paling banyak memperoleh air minum dengan cara membeli 91 persen. Sedangkan rumah tangga di Kabupaten Banjarnegara sekitar 89,42 persen mendapatkan air minum dengan cara tidak membeli (Tabel 4.7).

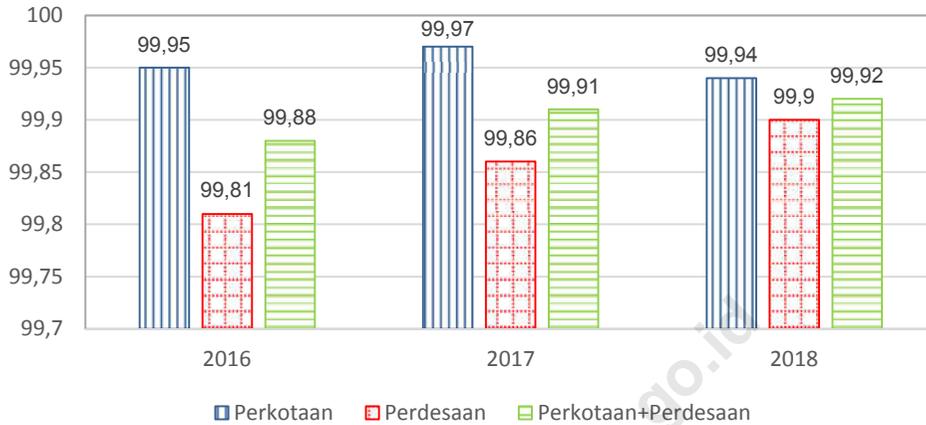
4.2 Sumber Penerangan

Rumah yang baik harus memiliki fasilitas penerangan yang cukup. Karena dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat dan nyaman beraktivitas. Pada siang hari umumnya masyarakat memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber penerangan. Namun bila di malam hari, masyarakat menggunakan beberapa alternatif sumber penerangan seperti listrik, petromak dan obor.

Susenas Maret 2018 memberikan gambaran mengenai persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik dan bukan listrik. Listrik meliputi listrik yang bersumber dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) maupun non PLN, seperti sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN) dan pembangkit listrik tenaga air (yang tidak dikelola oleh PLN). Sedangkan, sumber penerangan bukan listrik meliputi petromak/lampu aladin, pelita/sentir/obor, dan lainnya. Data tersebut bisa digunakan sebagai bentuk evaluasi keterjangkauan listrik hingga ke daerah perkotaan ataupun perdesaan.

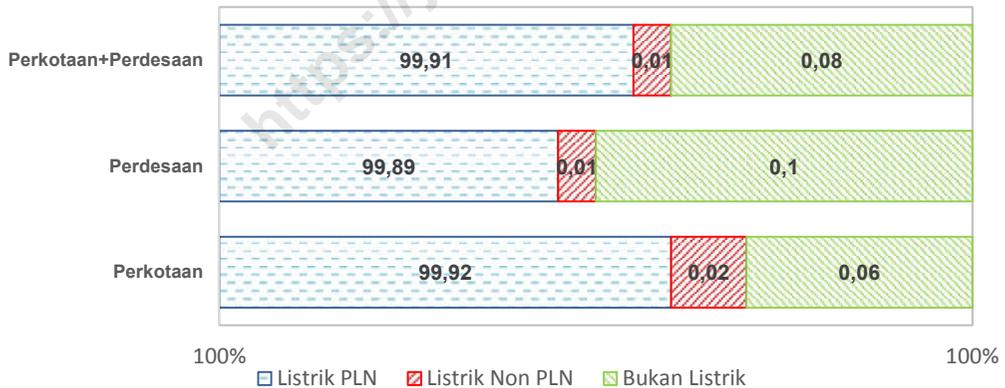
Seiring perkembangan jaman, listrik semakin menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika hampir semua rumah tangga sudah menggunakan listrik, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swadaya sendiri.

Gambar 4.2
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik
Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018



Sumber: Diolah dari Susenas: 2016, 2017, 2018

Gambar 4.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama
Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber: Diolah dari Susenas, 2018

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Jawa Tengah sudah dapat menikmati listrik sebagai sumber penerangan. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 99,92 persen sudah menikmati atau terjangkau penerangan listrik sebagai sumber penerangan utama, dimana 99,91 persen diantaranya dilayani oleh PLN dan 0.01 persen lainnya menggunakan listrik non PLN. Ini berarti masih

terdapat 0,08 persen dari total rumah tangga di Jawa Tengah yang menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan dalam rumah tinggalnya. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik mengalami penurunan.

Sumber penerangan listrik juga sudah menyebar sampai ke pelosok perdesaan. Sekitar 99,89 persen rumah tangga di daerah perdesaan di Provinsi Jawa Tengah telah memanfaatkan listrik PLN sebagai sumber penerangan, dan 0,1 persen menggunakan bukan listrik. Sementara di perkotaan persentase rumah tangga yang telah memanfaatkan listrik PLN mencapai 99,92 persen, dan sekitar 0,02 persen menggunakan listrik non PLN sebagai sumber penerangan. Meski demikian masih ada sekitar 0,06 persen rumah tangga di perkotaan yang belum menikmati fasilitas listrik (Gambar 4.3).

Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan utama listrik PLN paling sedikit berada di Kabupaten Purworejo (99,43 persen) dan Kabupaten Pemasang (99,66 persen). Namun demikian, hasil Susenas 2018 mencatat bahwa ada 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan utama bukan listrik seperti di Kabupaten Purworejo yang merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik terbesar di Jawa Tengah, yaitu mencapai 0,57 persen. Bahkan di Kota Magelang dan Kota Pekalongan masih terdapat rumah tangga yang sumber penerangan utamanya menggunakan bukan listrik, jumlahnya masing-masing mencapai 0,22 persen dan 0,15 persen rumah tangga (Tabel 4.8).

4.3 Tempat Buang Air Besar

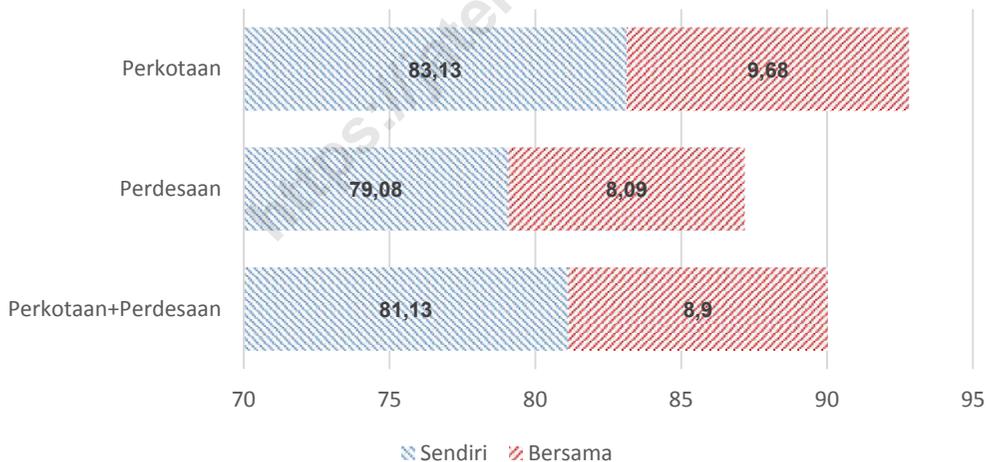
Selain sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran (jamban) merupakan sarana sanitasi lain yang semestinya terdapat dalam rumah. Jamban termasuk kelompok sarana sanitasi yang ada dalam 3 komponen penilaian rumah sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 829/Menkes/SK/VII/1999. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar yang tidak sehat merupakan salah satu faktor risiko penyebaran penyakit khususnya *water borne disease* yaitu penyakit yang disebabkan oleh kontak dengan air yang terkontaminasi mikroorganisme patogen. Kontaminasi bakteri *E. Coli* yang umumnya ada pada feses terhadap air minum akan berkurang jika fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh masyarakat sudah dikategorikan sehat. Fasilitas tempat buang air besar yang sehat itu memperhatikan penggunaan fasilitas buang air besar, jenis kloset, dan tempat

pembuangan akhir tinja. Rumah tangga juga akan cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa terjaga kebersihannya.

4.3.1 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar yang sehat memperhatikan jumlah pengguna dari fasilitas tersebut, semakin sedikit jumlah pengguna akan semakin baik. Susenas Maret 2018 membagi kriteria penggunaan menjadi penggunaan sendiri, bersama, umum, ada fasilitas tetapi tidak digunakan, dan tidak ada fasilitas buang air besar. Kriteria yang memenuhi fasilitas buang air besar yang layak yaitu yang digunakan sendiri dan bersama. Penggunaan sendiri adalah hanya rumah tangga tersebut yang menggunakan, sementara penggunaan bersama adalah hanya digunakan oleh rumah tangga tersebut bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Gambar 4.4
Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri dan Bersama Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Gambar 4.4 memberikan informasi bahwa pada tahun 2018 rumah tangga di Jawa Tengah yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dan bersama sebesar 90,03 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri dan bersama di daerah perkotaan lebih tinggi (92,81 persen) dari pada di daerah perdesaan (87,17 persen). Hal ini memperlihatkan

bahwa masyarakat di daerah perkotaan lebih memperhatikan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar bagi rumah tangganya.

Di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2018 masih ditemukan rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar yaitu sebanyak 8,20 persen. Rumah tangga di perdesaan yang tidak terdapat fasilitas buang air besar lebih tinggi dari pada di perkotaan, tercatat 11,17 persen dibanding 5,31 persen. Hal ini mengindikasikan masiuh belum meratanya ketersediaan fasilitas buang air besar untuk rumah tangga, khususnya di daerah perdesaan yang kemungkinan masih membuang kotorannya langsung di kebun, sungai, sawah, dan tempat tertentu lainnya. Meski demikian terjadi penurunan persentase dari tahun 2016 ke tahun 2018 (Gambar 4.5).

Gambar 4.5
Persentase Rumah Tangga yang Tidak memiliki Fasilitas Buang Air Besar Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018



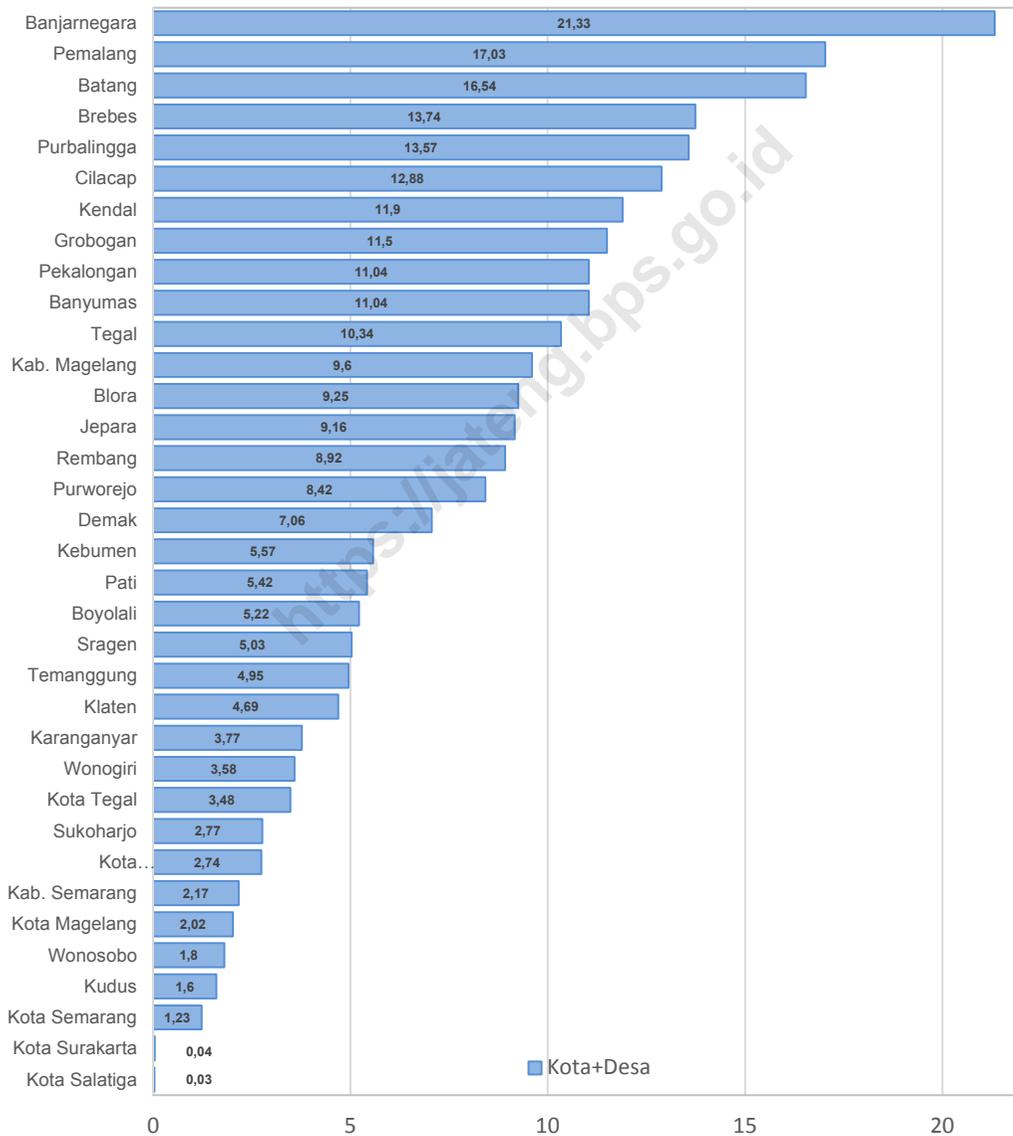
Sumber: Susenas, 2016 - 2018

Rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pemasang dan Kabupaten Batang merupakan kabupaten dengan persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas buang air besar tertinggi, masing-masing tercatat sebesar 21,33 persen, 17,03 persen dan 16,54 persen. Sedangkan persentase terkecil terdapat di Kota Salatiga (0,03 persen) dan Kota Surakarta (0,04 persen) (Gambar 4.6).

Masih adanya rumah tangga yang tinggal di rumah tanpa jamban patut mendapat perhatian dari pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan masalah kesehatan penghuni rumah maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kotoran

yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang disebarkan oleh vektor penyakit seperti lalat maupun serangga lain. Disamping itu, perilaku membuang kotoran secara sembarangan juga dapat mengganggu kenyamanan penduduk di sekitarnya akibat bau yang ditimbulkannya

Gambar 4.6
Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber: Susenas, 2018

4.3.2 Penggunaan Kloset

Salah satu kriteria fasilitas buang air besar yang sehat terlihat dari jenis kloset yang digunakan. Syarat kloset yang baik yaitu merupakan tempat penyimpanan feces yang baik, kuat, mudah dibersihkan, berbentuk leher angsa atau menggunakan tutup yang mudah diangkat sehingga meminimalisir pemindahan kuman penyakit dari feces ke inang baru melalui perantara air ataupun serangga.

Penggunaan kloset oleh rumah tangga di Jawa Tengah bervariasi. Dalam Susenas, jenis kloset dirinci menjadi leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup, dan cemplung/cubluk. Pertanyaan mengenai jenis kloset yang digunakan hanya ditanyakan pada rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dan penggunaannya sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Kloset leher angsa merupakan salah satu jenis jamban/kakus yang memenuhi persyaratan kesehatan, seperti diantaranya menghindari pencemaran pada sumber-sumber air minum dan permukaan tanah yang ada di sekitar jamban, menghindari atau mencegah timbulnya bau, tidak memungkinkan berkembang biaknya lalat, serta dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Tabel 4.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset dan Tipe Daerah,
Provinsi Jawa Tengah, 2018

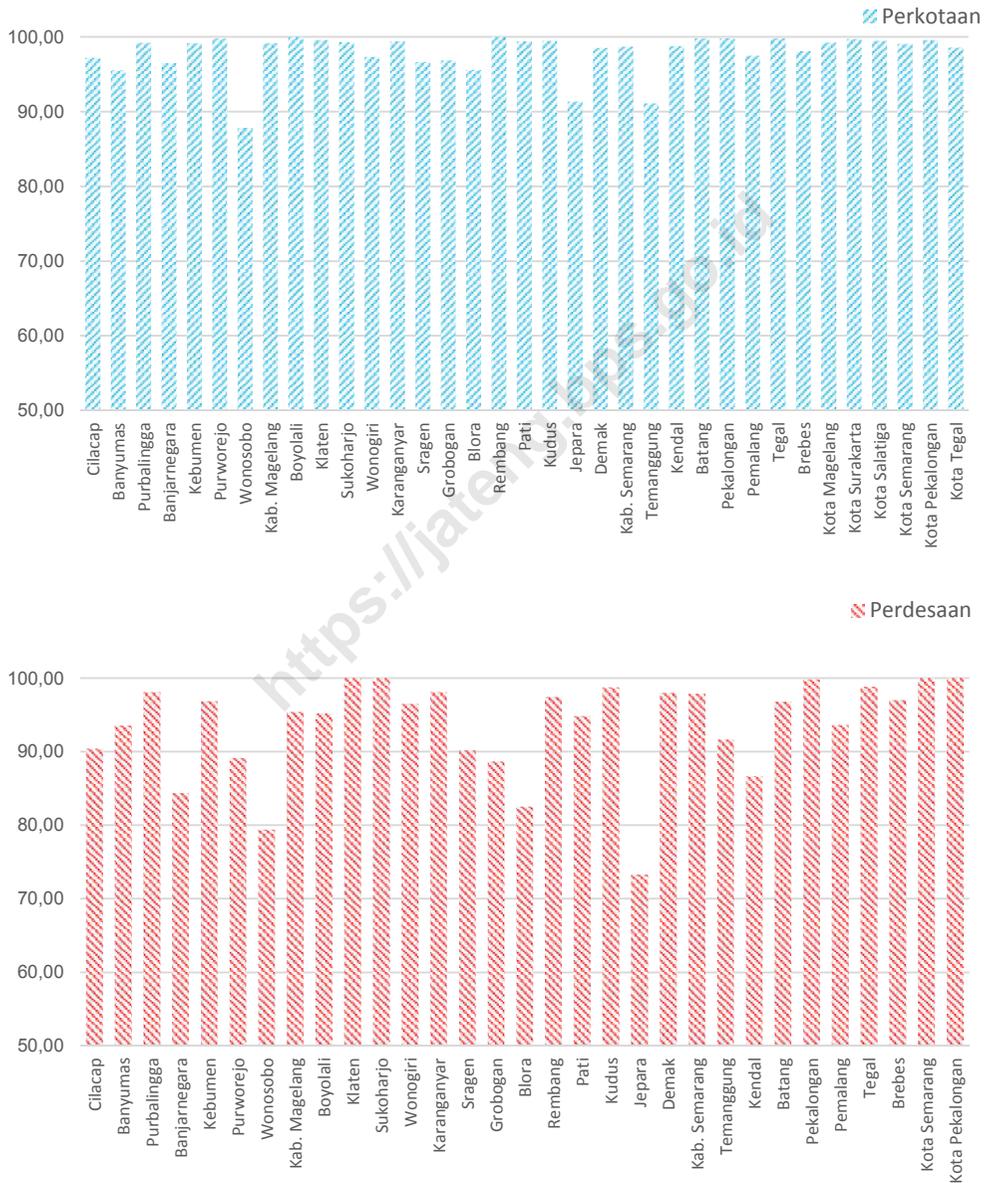
Jenis Kloset	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Leher Angsa	98,13	92,71	95,55
Plengsengan Tertutup/ Tanpa Tutup	0,70	2,55	1,58
Cemplung/Cubluk	1,17	4,74	2,87
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama sebanyak 95,55 persen sudah menggunakan kloset jenis leher angsa. Namun demikian masih terdapat rumah tangga yang menggunakan jenis kloset plengsengan (1,58 persen), dan cemplung/cubluk (2,87 persen). Hal ini berarti bahwa mayoritas rumah tangga di Jawa Tengah dengan

fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama sudah menggunakan kloset yang memenuhi syarat kesehatan.

Gambar 4.7
Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Jenis Kloset Leher Angsa Menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber: Susenas, 2018

Gambar 4.7 memperlihatkan bahwa mayoritas rumah tangga di daerah perkotaan di Jawa Tengah, fasilitas tempat buang air besar telah menggunakan jenis kloset leher angsa. Sementara itu untuk daerah perdesaan, terlihat bahwa masih ada lebih dari seperempat dari total rumah tangga perdesaan di Kabupaten Jepara yang walaupun telah memiliki fasilitas tempat buang air besar namun belum menggunakan kloset yang memenuhi syarat kesehatan. Sementara, kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan persentase rumah tangga yang menggunakan jenis kloset leher angsa terbanyak terdapat di Kabupaten Pekalongan (99,81 persen), Kota Surakarta (99,71 persen) dan Kabupaten Klaten (99,7 persen) (Tabel 4.10).

Kriteria pendukung fasilitas buang air besar yang sehat yang terakhir yaitu Tempat Pembuangan Akhir Tinja (TPAT). Sama halnya dengan jenis kloset yang digunakan, pertanyaan terkait TPAT pada Susenas hanya ditanyakan pada rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dan penggunaannya sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Pilihan TPAT yang digunakan pada Susenas yaitu tangki septik, IPAL, kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, serta lainnya. Dari beberapa jenis tempat pembuangan akhir tinja, Tangki Septik ataupun IPAL merupakan tempat pembuangan yang paling memenuhi standar kesehatan karena mengurangi tercemarnya sumber air minum rumah tangga dari resapan limbah tinja. Tempat pembuangan akhir tinja di tempat terbuka rentan menjadi penyebab penyakit, khususnya jika dalam tinja terkandung kuman penyakit, seperti disentri, selain juga mengurangi estetika lingkungan.

Tabel 4.4
Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tangki septik	87,05	76,02	81,78
SPAL	1,38	0,20	0,82
Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	7,40	8,89	8,11
Lubang Tanah	3,85	14,37	8,87
Pantai/Tanah Lapang/Kebun/Lainnya	0,32	0,52	0,42
Jumlah	100,00	100,00	100,00

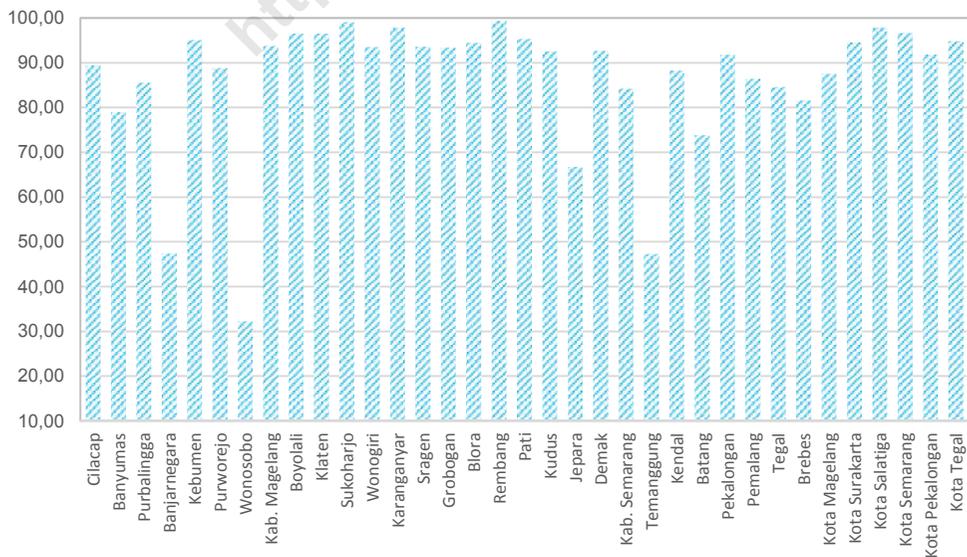
Sumber: Susenas 2018

Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama yang belum menggunakan TPAT berupa tangki septik atau IPAL sebanyak 17,40 persen. Dengan kata lain, rumah tangga ini masih memiliki TPAT yang belum memenuhi syarat kesehatan. Persentase rumah tangga semacam ini di perkotaan sebanyak 11,57 persen sedangkan di perdesaan jumlahnya sebanyak 23,78 persen (Tabel 4.4). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perdesaan perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan standar kesehatan dari sisi TPAT.

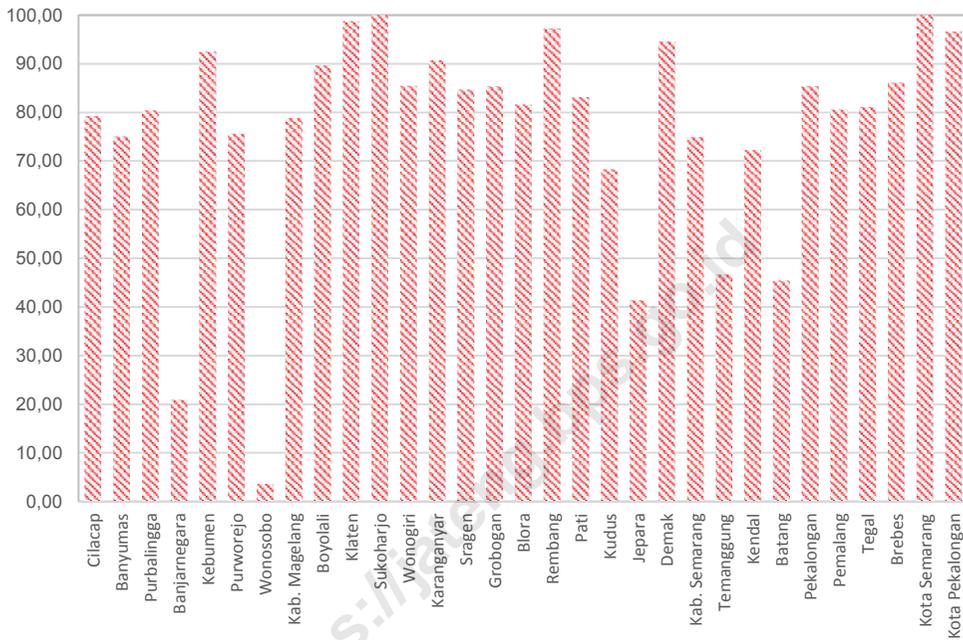
Untuk daerah perkotaan (Gambar 4.8), tercatat 3 (tiga) kabupaten yang persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar yang telah menggunakan TPAT yang memenuhi standar kesehatan yang kurang dari 50 persen, yaitu Kabupaten Wonosobo (32,27 persen), Kabupaten Temanggung (47,28 persen) dan Kabupaten Banjarnegara (47,34 persen). Sementara untuk daerah perdesaan (Gambar 4.9), 5 kabupaten tercatat memiliki persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar yang telah menggunakan TPAT yang memenuhi standar kesehatan yang kurang dari 50 persen, yaitu Kabupaten Wonosobo (3,63 persen), Kabupaten Banjarnegara (20,9 persen), Kabupaten Jepara (41,38 persen), Kabupaten Batang 45,4 persen) dan kabupaten Temanggung (46,64 persen)

Gambar 4.8

Persentase Rumah Tangga Perkotaan dengan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Berupa Tangki Septik atau IPAL Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2018



Gambar 4.9
Persentase Rumah Tangga Perdesaan dengan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Berupa Tangki Septik atau IPAL Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber: Susenas, 2018

<https://jateng.bps.go.id>

Kesehatan Lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan didefinisikan sebagai upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi: air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

Selain disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, isu kesehatan lingkungan ini juga menjadi salah satu pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia. TPB terkait kesehatan lingkungan dikelompokkan ke dalam Pilar Pembangunan Lingkungan yang terdiri atas 6 tujuan, yaitu: Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua; Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif; Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya; Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

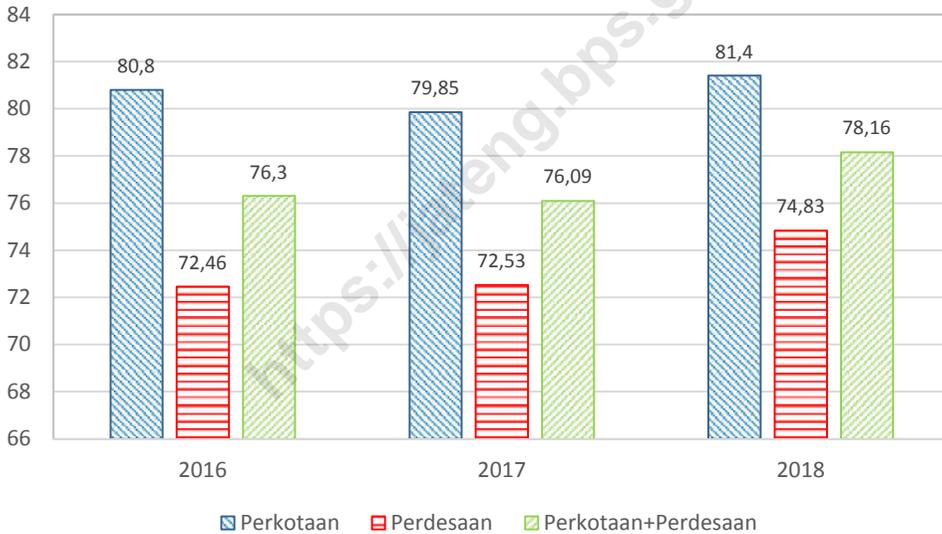
5.1 Air Minum Layak

Air minum layak sesuai dengan metadata indikator TPB didefinisikan sebagai air minum yang terlindung meliputi air leding (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai, danau, waduk, kolam, atau irigasi). Definisi tersebut merupakan pendekatan untuk mengukur

pencapaian target global memberikan akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030.

Gambar 5.1 menunjukkan gambaran aksesibilitas rumah tangga terhadap air minum layak berdasarkan tipe daerah dan perkembangannya dari tahun 2016 hingga 2018. Di Provinsi Jawa Tengah, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak meningkat sebesar 1,86 persen dari tahun 2016 ke tahun 2018, yaitu dari 76,3 persen menjadi 78,16 persen. Peningkatan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di perdesaan hampir empat kali lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini mengindikasikan kemajuan pembangunan di daerah perdesaan yang cukup pesat.

Gambar 5.1
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018



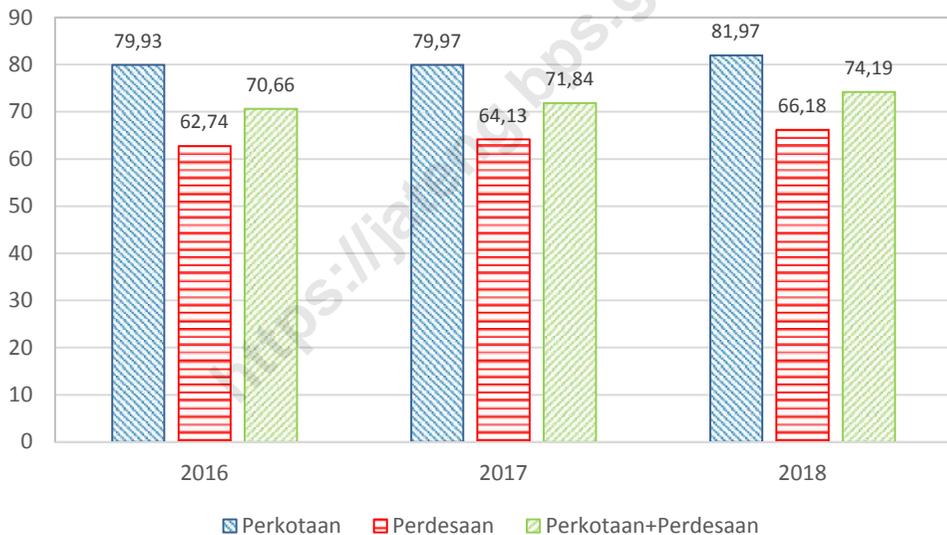
Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Tabel 5.1 menyajikan perbandingan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Selama tahun 2016-2018, wilayah dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak adalah Kota Tegal. Selama periode 2017-2018, Kabupaten Kebumen merupakan wilayah di Jawa Tengah dengan persentase terendah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak.

5.2 Sanitasi Layak

Berdasarkan metadata TPB ke-6, fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017)

Gambar 5.2
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2018 sebesar 3,53 persen. Jika dilihat menurut tipe daerah, persentase di perkotaan cenderung lebih tinggi dari pada di perdesaan. Selama periode ini, persentase untuk daerah perkotaan menunjukkan peningkatan walaupun nilainya sekitar 2 persen. Sedangkan untuk perdesaan, pada periode yang sama menunjukkan peningkatan sebesar 3,44 persen (Gambar 5.2).

Tabel 5.3 menyajikan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 – 2018.

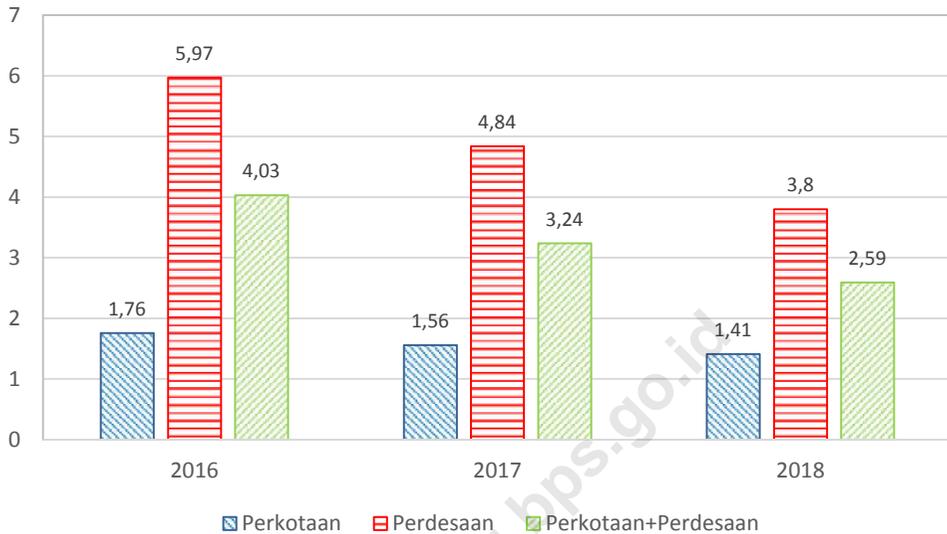
Pada periode tahun 2016, Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, yaitu mencapai 94,26 persen. Sementara untuk periode tahun 2017 – 2018, Kota Salatiga menjadi wilayah dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, yaitu mencapai 94,66 persen (tahun 2017) dan 97,47 persen (tahun 2018). Adapun wilayah dengan persentase terendah pada periode 2016-2018 adalah Kabupaten Wonosobo, bahkan persentasenya mengalami penurunan selama periode tersebut, yaitu dari 18,71 pada tahun 2016 menjadi 9,24 persen pada tahun 2018.

5.3 Rumah Tidak Layak Huni

Salah satu indikator dari TPB ke-11 adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria, meliputi: kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) minimal 7,2 m² per kapita, memiliki akses air minum (*access to improved water*), memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*), dan memenuhi syarat ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan utama atap rumah terluas bukan jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia/lainnya, bahan bangunan utama lantai terluas bukan berupa tanah atau lainnya, serta bahan bangunan utama dinding rumah terluas bukan berupa bambu atau lainnya. Indikator ini dapat digunakan untuk memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, sebagai upaya pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar, atau rumah yang tidak layak (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017)

Persentase rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni menurun dari 4,03 persen pada tahun 2016 menjadi 2,59 persen pada tahun 2018 (Gambar 5.3). Selama periode 2016-2018, persentase rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni menunjukkan penurunan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Penurunan di perdesaan lebih cepat dibandingkan perkotaan sehingga kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan semakin kecil.

Gambar 5.3
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni
Menurut Tipe Daerah, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Jika dilihat pada Tabel 5.3, persentase tertinggi rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni pada tahun 2016 – 2018 terdapat di Kabupaten Grobogan meskipun persentasenya berangsur menurun, yaitu sebesar 12,33 persen pada tahun 2016 menjadi 8,41 persen pada tahun 2018. Sementara itu persentase terendah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni pada tahun 2016 terdapat di Kota Salatiga. Namun pada tahun 2017 – 2018 persentase terendah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni berada di Kota Tegal.

<https://jateng.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://jateng.bps.go.id>

Tabel 3.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan
Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal				Jumlah
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Cilacap	92,61	2,21	5,01	0,17	100,00
Kab. Banyumas	92,60	1,94	4,60	0,86	100,00
Kab. Purbalingga	95,15	0,81	3,41	0,63	100,00
Kab. Banjarnegara	94,89	0,63	4,33	0,15	100,00
Kab. Kebumen	91,14	1,04	6,71	1,11	100,00
Kab. Purworejo	84,16	3,46	11,55	0,83	100,00
Kab. Wonosobo	92,10	1,69	6,04	0,17	100,00
Kab. Magelang	90,70	1,83	7,25	0,22	100,00
Kab. Boyolali	94,12	2,09	3,34	0,45	100,00
Kab. Klaten	87,16	1,12	11,72	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	81,75	6,44	11,81	0,00	100,00
Kab. Wonogiri	95,56	0,54	3,54	0,36	100,00
Kab. Karanganyar	85,89	3,49	10,53	0,09	100,00
Kab. Sragen	93,31	1,07	3,69	1,93	100,00
Kab. Grobogan	94,75	0,10	4,94	0,21	100,00
Kab. Blora	90,44	0,85	8,37	0,34	100,00
Kab. Rembang	95,71	0,85	3,19	0,25	100,00
Kab. Pati	95,73	0,55	3,15	0,57	100,00
Kab. Kudus	89,07	4,15	6,78	0,00	100,00
Kab. Jepara	93,62	0,63	5,42	0,33	100,00
Kab. Demak	95,19	0,68	3,95	0,18	100,00
Kab. Semarang	90,70	3,38	5,64	0,28	100,00
Kab. Temanggung	94,90	1,91	2,91	0,28	100,00
Kab. Kendal	90,62	1,70	7,60	0,08	100,00
Kab. Batang	94,06	0,86	4,90	0,18	100,00
Kab. Pekalongan	93,49	2,21	4,15	0,15	100,00
Kab. Pemalang	86,12	1,20	12,55	0,13	100,00
Kab. Tegal	78,52	2,56	17,26	1,66	100,00
Kab. Brebes	82,94	1,74	15,20	0,12	100,00
Kota Magelang	60,71	17,30	19,57	2,42	100,00
Kota Surakarta	60,52	18,58	19,22	1,68	100,00
Kota Salatiga	65,41	23,35	9,84	1,40	100,00
Kota Semarang	65,00	13,12	21,20	0,68	100,00
Kota Pekalongan	68,82	3,92	26,02	1,24	100,00
Kota Tegal	63,91	6,95	29,14	0,00	100,00
Provinsi Jawa Tengah	88,17	2,85	8,51	0,47	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 3.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas
Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal			
	Beton	Genteng	Asbes	Seng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Cilacap	1,90	76,01	17,80	4,29
Kab. Banyumas	1,62	67,90	11,27	19,21
Kab. Purbalingga	0,36	40,43	8,99	49,84
Kab. Banjarnegara	1,45	80,14	5,24	13,17
Kab. Kebumen	0,80	89,98	5,60	3,10
Kab. Purworejo	0,21	94,53	3,49	1,77
Kab. Wonosobo	3,93	45,99	10,14	39,81
Kab. Magelang	1,76	96,43	1,39	0,42
Kab. Boyolali	0,17	98,39	0,65	0,71
Kab. Klaten	0,57	98,40	1,03	0,00
Kab. Sukoharjo	2,29	96,20	1,08	0,28
Kab. Wonogiri	3,42	95,41	0,86	0,00
Kab. Karanganyar	2,02	92,23	1,36	4,26
Kab. Sragen	1,28	96,97	1,31	0,17
Kab. Grobogan	1,99	95,81	1,91	0,00
Kab. Blora	0,58	98,66	0,38	0,00
Kab. Rembang	0,49	98,56	0,87	0,00
Kab. Pati	1,56	97,46	0,83	0,15
Kab. Kudus	0,88	98,44	0,45	0,23
Kab. Jepara	1,33	95,24	2,67	0,27
Kab. Demak	1,56	92,44	5,56	0,30
Kab. Semarang	2,54	89,96	7,12	0,27
Kab. Temanggung	3,53	86,95	3,20	6,16
Kab. Kendal	0,73	94,15	2,76	2,36
Kab. Batang	0,00	87,20	1,91	10,89
Kab. Pekalongan	2,72	90,50	2,18	4,47
Kab. Pemasaran	0,88	72,64	4,53	21,65
Kab. Tegal	1,87	87,10	4,94	6,09
Kab. Brebes	0,86	97,66	1,44	0,04
Kota Magelang	0,87	87,45	7,74	3,94
Kota Surakarta	5,19	85,57	6,32	2,22
Kota Salatiga	0,36	89,46	8,51	1,34
Kota Semarang	3,95	72,66	21,12	2,18
Kota Pekalongan	0,62	97,30	1,52	0,56
Kota Tegal	0,67	94,05	5,24	0,04
Prov. Jawa Tengah	1,66	87,36	5,20	5,64

Sumber: Susenas 2018

Tabel 3.2 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal			
	Bambu/Kayu/ Sirap	Jerami/ Ijuk/ Daun/ Rumbia	Lainnya	Jumlah
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Cilacap	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Banyumas	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Purbalingga	0,19	0,00	0,19	100,00
Kab. Banjarnegara	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Kebumen	0,00	0,00	0,52	100,00
Kab. Purworejo	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Wonosobo	0,13	0,00	0,00	100,00
Kab. Magelang	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Boyolali	0,08	0,00	0,00	100,00
Kab. Klaten	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	0,00	0,15	0,00	100,00
Kab. Wonogiri	0,10	0,00	0,21	100,00
Kab. Karanganyar	0,00	0,00	0,13	100,00
Kab. Sragen	0,27	0,00	0,00	100,00
Kab. Grobogan	0,29	0,00	0,00	100,00
Kab. Blora	0,38	0,00	0,00	100,00
Kab. Rembang	0,08	0,00	0,00	100,00
Kab. Pati	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Kudus	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Jepara	0,23	0,26	0,00	100,00
Kab. Demak	0,14	0,00	0,00	100,00
Kab. Semarang	0,11	0,00	0,00	100,00
Kab. Temanggung	0,00	0,00	0,16	100,00
Kab. Kendal	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Batang	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Pekalongan	0,00	0,13	0,00	100,00
Kab. Pemalang	0,05	0,21	0,04	100,00
Kab. Tegal	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Brebes	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Magelang	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Surakarta	0,23	0,00	0,47	100,00
Kota Salatiga	0,00	0,00	0,33	100,00
Kota Semarang	0,00	0,00	0,09	100,00
Kota Pekalongan	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Tegal	0,00	0,00	0,00	100,00
Prov. Jawa Tengah	0,07	0,02	0,05	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 3.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding
Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal					Jumlah
	Tembok	Plasteran Ayaman Bambu/ Kawat	Kayu/ Batang Kayu	Bambu/ Anyaman Bambu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Cilacap	78,09	1,31	9,17	9,86	1,57	100,00
Kab. Banyumas	77,38	0,49	18,23	3,90	0,00	100,00
Kab. Purbalingga	86,31	1,04	7,00	5,65	0,00	100,00
Kab. Banjarnegara	83,76	0,61	12,75	2,54	0,34	100,00
Kab. Kebumen	90,98	0,67	2,72	2,49	3,14	100,00
Kab. Purworejo	87,39	0,00	6,09	3,48	3,04	100,00
Kab. Wonosobo	79,66	0,13	19,64	0,27	0,30	100,00
Kab. Magelang	88,37	0,00	7,29	4,34	0,00	100,00
Kab. Boyolali	74,07	0,15	22,74	2,40	0,64	100,00
Kab. Klaten	97,91	0,29	0,35	1,45	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	92,02	0,41	3,54	1,24	2,79	100,00
Kab. Wonogiri	80,93	0,50	15,93	1,34	1,30	100,00
Kab. Karanganyar	96,74	0,26	2,27	0,55	0,18	100,00
Kab. Sragen	70,71	0,47	24,56	3,77	0,49	100,00
Kab. Grobogan	20,96	0,21	75,32	3,20	0,31	100,00
Kab. Blora	19,52	0,42	77,47	1,16	1,43	100,00
Kab. Rembang	64,50	0,60	26,47	7,90	0,53	100,00
Kab. Pati	83,59	0,23	11,82	4,02	0,34	100,00
Kab. Kudus	97,35	0,30	1,50	0,85	0,00	100,00
Kab. Jepara	88,69	0,33	8,39	1,27	1,32	100,00
Kab. Demak	62,23	0,46	35,43	1,72	0,16	100,00
Kab. Semarang	83,99	0,19	15,18	0,56	0,08	100,00
Kab. Temanggung	82,52	0,26	15,32	0,13	1,77	100,00
Kab. Kendal	61,65	0,64	35,94	1,47	0,30	100,00
Kab. Batang	76,93	0,00	22,20	0,87	0,00	100,00
Kab. Pekalongan	93,39	0,25	4,39	1,16	0,81	100,00
Kab. Pemasang	85,27	0,17	11,10	2,46	1,00	100,00
Kab. Tegal	91,27	0,18	3,95	3,62	0,98	100,00
Kab. Brebes	90,89	0,55	3,43	4,62	0,51	100,00
Kota Magelang	93,22	0,00	6,04	0,74	0,00	100,00
Kota Surakarta	94,98	0,55	3,61	0,71	0,15	100,00
Kota Salatiga	89,44	1,23	9,08	0,25	0,00	100,00
Kota Semarang	93,39	0,12	6,34	0,00	0,15	100,00
Kota Pekalongan	93,79	0,75	3,75	1,39	0,32	100,00
Kota Tegal	99,37	0,09	0,35	0,19	0,00	100,00
Prov. Jawa Tengah	80,07	0,40	16,08	2,72	0,73	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 3.4
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai
Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal			
	Marmar/ Granit	Keramik	Parket/ Vinil/ Permadani/ Ubin/ Tegel/ Teraso	Kayu/ Papan Kualitas Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Cilacap	0,56	59,08	11,41	0,00
Kab. Banyumas	0,31	56,38	14,80	0,13
Kab. Purbalingga	0,58	57,98	12,41	0,13
Kab. Banjarnegara	1,28	48,74	14,64	0,13
Kab. Kebumen	0,72	51,05	14,19	0,17
Kab. Purworejo	0,16	44,98	15,36	0,00
Kab. Wonosobo	0,77	43,24	4,12	0,71
Kab. Magelang	0,35	42,20	8,60	0,04
Kab. Boyolali	0,20	40,56	6,95	0,96
Kab. Klaten	0,69	49,36	15,48	0,00
Kab. Sukoharjo	1,23	57,53	11,47	0,00
Kab. Wonogiri	1,05	40,81	25,98	0,28
Kab. Karanganyar	0,86	61,79	10,52	0,24
Kab. Sragen	0,91	38,50	7,90	0,08
Kab. Grobogan	0,49	19,28	9,37	8,21
Kab. Blora	0,25	21,55	6,01	6,35
Kab. Rembang	0,44	51,65	6,22	0,13
Kab. Pati	2,65	56,73	8,86	0,00
Kab. Kudus	1,17	70,85	12,89	0,00
Kab. Jepara	1,03	56,25	9,38	0,51
Kab. Demak	2,88	41,47	6,64	6,83
Kab. Semarang	0,61	52,91	8,49	1,16
Kab. Temanggung	0,69	45,14	10,56	0,37
Kab. Kendal	0,85	48,32	13,80	0,00
Kab. Batang	2,14	64,67	9,52	0,00
Kab. Pekalongan	2,36	69,57	9,95	0,07
Kab. Pemaslang	1,65	59,01	12,54	0,00
Kab. Tegal	1,19	59,09	12,28	0,00
Kab. Brebes	1,14	63,35	9,05	0,21
Kota Magelang	0,64	57,49	15,46	0,46
Kota Surakarta	1,51	64,20	15,63	0,61
Kota Salatiga	1,87	64,93	9,86	0,00
Kota Semarang	1,22	77,37	8,91	0,24
Kota Pekalongan	0,79	72,07	13,45	0,00
Kota Tegal	2,15	74,11	11,79	0,00
Prov. Jawa Tengah	1,03	52,85	11,09	0,93

Sumber: Susenas 2018

Tabel 3.4 (lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal				
	Semen/ Bata Merah	Bambu/ Kayu/ Papan Kualitas Rendah	Tanah	Lainnya	Jumlah
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Cilacap	19,40	0,00	9,55	0,00	100,00
Kab. Banyumas	22,51	0,09	5,78	0,00	100,00
Kab. Purbalingga	20,48	0,12	8,18	0,12	100,00
Kab. Banjarnegara	24,90	0,00	10,31	0,00	100,00
Kab. Kebumen	29,22	0,00	4,58	0,07	100,00
Kab. Purworejo	27,57	0,00	11,93	0,00	100,00
Kab. Wonosobo	43,38	0,00	7,78	0,00	100,00
Kab. Magelang	37,20	0,00	11,61	0,00	100,00
Kab. Boyolali	36,36	0,00	14,85	0,12	100,00
Kab. Klaten	31,12	0,00	3,35	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	25,72	0,00	3,92	0,13	100,00
Kab. Wonogiri	24,68	0,00	5,95	1,25	100,00
Kab. Karanganyar	24,06	0,15	2,38	0,00	100,00
Kab. Sragen	34,70	0,54	17,31	0,06	100,00
Kab. Grobogan	15,67	0,50	46,24	0,24	100,00
Kab. Blora	15,46	0,06	49,46	0,86	100,00
Kab. Rembang	11,57	0,24	29,09	0,66	100,00
Kab. Pati	15,22	0,11	16,43	0,00	100,00
Kab. Kudus	11,69	0,00	3,40	0,00	100,00
Kab. Jepara	18,96	0,00	13,87	0,00	100,00
Kab. Demak	27,14	0,00	15,04	0,00	100,00
Kab. Semarang	27,76	0,00	9,07	0,00	100,00
Kab. Temanggung	33,94	0,00	9,30	0,00	100,00
Kab. Kendal	16,93	0,00	20,10	0,00	100,00
Kab. Batang	10,22	0,00	13,45	0,00	100,00
Kab. Pekalongan	12,54	0,00	5,51	0,00	100,00
Kab. Pemalang	13,11	0,16	13,53	0,00	100,00
Kab. Tegal	18,43	0,00	8,25	0,76	100,00
Kab. Brebes	17,09	0,00	9,04	0,12	100,00
Kota Magelang	25,32	0,00	0,63	0,00	100,00
Kota Surakarta	17,50	0,00	0,48	0,07	100,00
Kota Salatiga	22,34	0,00	1,00	0,00	100,00
Kota Semarang	10,73	0,00	1,39	0,14	100,00
Kota Pekalongan	10,38	0,00	3,31	0,00	100,00
Kota Tegal	10,08	0,00	1,87	0,00	100,00
Prov. Jawa Tengah	21,89	0,06	12,01	0,14	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 3.5
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai
Per Kapita Bangunan Tempat Tinggal, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Per Kapita Bangunan Tempat Tinggal (m ²)			
	≤ 7,2 m ²	7,3 - 9,9 m ²	≥ 10 m ²	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Cilacap	0,73	4,91	94,36	100,00
Kab. Banyumas	2,60	4,39	93,01	100,00
Kab. Purbalingga	0,93	7,71	91,36	100,00
Kab. Banjarnegara	1,28	4,27	94,45	100,00
Kab. Kebumen	1,28	4,74	93,98	100,00
Kab. Purworejo	1,51	3,09	95,40	100,00
Kab. Wonosobo	2,33	6,41	91,26	100,00
Kab. Magelang	1,44	5,84	92,72	100,00
Kab. Boyolali	0,61	2,65	96,74	100,00
Kab. Klaten	2,23	2,10	95,67	100,00
Kab. Sukoharjo	3,59	2,39	94,02	100,00
Kab. Wonogiri	0,30	1,17	98,53	100,00
Kab. Karanganyar	0,21	1,88	97,91	100,00
Kab. Sragen	0,77	1,20	98,03	100,00
Kab. Grobogan	0,00	1,61	98,39	100,00
Kab. Blora	0,40	1,69	97,91	100,00
Kab. Rembang	1,68	4,63	93,69	100,00
Kab. Pati	2,63	4,12	93,25	100,00
Kab. Kudus	2,89	5,29	91,82	100,00
Kab. Jepara	1,11	5,28	93,61	100,00
Kab. Demak	2,47	3,84	93,69	100,00
Kab. Semarang	1,36	2,62	96,02	100,00
Kab. Temanggung	1,32	2,80	95,88	100,00
Kab. Kendal	1,97	2,86	95,17	100,00
Kab. Batang	1,47	2,94	95,59	100,00
Kab. Pekalongan	0,60	3,50	95,90	100,00
Kab. Pemasang	3,68	5,94	90,38	100,00
Kab. Tegal	0,99	3,24	95,77	100,00
Kab. Brebes	3,90	5,23	90,87	100,00
Kota Magelang	6,12	8,67	85,21	100,00
Kota Surakarta	14,81	7,92	77,27	100,00
Kota Salatiga	4,30	4,91	90,79	100,00
Kota Semarang	5,89	4,64	89,47	100,00
Kota Pekalongan	6,65	5,86	87,49	100,00
Kota Tegal	6,05	5,00	88,95	100,00
Prov. Jawa Tengah	2,18	3,96	93,86	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.5
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan
Sumber Air Minum, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum				
	Air Kemasan Bermerk/ Isi Ulang	Ledeng	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Cilacap	25,39	10,72	16,56	29,49	5,62
Kab. Banyumas	17,13	14,71	10,08	32,77	2,85
Kab. Purbalingga	7,40	18,34	5,54	42,88	5,21
Kab. Banjarnegara	3,24	2,76	19,93	27,61	2,85
Kab. Kebumen	15,89	4,10	7,52	57,34	3,02
Kab. Purworejo	9,37	6,94	20,20	40,43	4,55
Kab. Wonosobo	3,24	40,26	0,19	5,71	0,89
Kab. Magelang	1,37	19,65	10,51	24,87	5,25
Kab. Boyolali	10,90	11,06	22,33	36,25	3,42
Kab. Klaten	9,19	19,03	21,24	46,72	1,38
Kab. Sukoharjo	31,41	4,11	26,18	30,34	3,48
Kab. Wonogiri	7,13	12,84	28,04	17,44	2,68
Kab. Karanganyar	15,35	20,76	23,48	20,15	0,92
Kab. Sragen	33,35	15,23	16,09	18,49	2,53
Kab. Grobogan	61,27	3,88	8,52	13,18	8,44
Kab. Blora	38,19	1,64	28,16	24,98	5,45
Kab. Rembang	43,98	1,46	34,54	7,79	0,82
Kab. Pati	48,52	9,03	19,11	10,60	0,69
Kab. Kudus	30,50	14,00	33,63	19,31	0,74
Kab. Jepara	21,11	10,26	29,39	27,00	6,19
Kab. Demak	61,42	9,34	23,19	2,78	0,04
Kab. Semarang	12,09	11,50	33,38	12,97	3,68
Kab. Temanggung	3,20	20,49	18,30	10,53	0,78
Kab. Kendal	22,44	28,15	17,06	15,39	1,23
Kab. Batang	3,81	24,32	2,99	42,64	0,73
Kab. Pekalongan	14,37	9,47	27,32	30,63	3,40
Kab. Pemalang	15,90	25,84	33,42	10,21	1,42
Kab. Tegal	14,74	33,71	24,71	20,20	2,07
Kab. Brebes	19,25	24,48	20,43	19,60	0,72
Kota Magelang	13,83	64,06	13,95	5,43	0,00
Kota Surakarta	52,54	15,40	25,39	5,48	0,31
Kota Salatiga	32,81	43,53	8,87	10,62	0,95
Kota Semarang	64,00	19,05	10,08	3,87	0,39
Kota Pekalongan	12,28	32,98	23,55	29,58	1,61
Kota Tegal	8,83	88,79	1,12	0,82	0,44
Prov. Jawa Tengah	24,33	16,22	19,10	22,45	2,71

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.5 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum				Jumlah
	Mata Air Terlindung/ Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kab. Cilacap	8,13	0,65	3,44	0,00	100,00
Kab. Banyumas	20,08	1,83	0,55	0,00	100,00
Kab. Purbalingga	20,34	0,00	0,29	0,00	100,00
Kab. Banjarnegara	43,45	0,16	0,00	0,00	100,00
Kab. Kebumen	12,13	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Purworejo	18,51	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Wonosobo	49,31	0,37	0,03	0,00	100,00
Kab. Magelang	38,14	0,21	0,00	0,00	100,00
Kab. Boyolali	12,02	0,23	3,62	0,17	100,00
Kab. Klaten	0,65	0,00	1,79	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	4,26	0,09	0,00	0,13	100,00
Kab. Wonogiri	30,01	0,44	1,25	0,17	100,00
Kab. Karanganyar	19,12	0,00	0,00	0,22	100,00
Kab. Sragen	14,08	0,00	0,00	0,23	100,00
Kab. Grobogan	4,49	0,22	0,00	0,00	100,00
Kab. Blora	1,36	0,09	0,00	0,13	100,00
Kab. Rembang	11,11	0,00	0,30	0,00	100,00
Kab. Pati	11,73	0,00	0,12	0,20	100,00
Kab. Kudus	1,82	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Jepara	5,64	0,00	0,00	0,41	100,00
Kab. Demak	0,39	1,62	1,22	0,00	100,00
Kab. Semarang	26,38	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Temanggung	46,70	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Kendal	15,73	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Batang	25,51	0,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Pekalongan	14,68	0,00	0,00	0,13	100,00
Kab. Pemalang	10,46	0,82	1,93	0,00	100,00
Kab. Tegal	4,36	0,11	0,00	0,10	100,00
Kab. Brebes	14,82	0,70	0,00	0,00	100,00
Kota Magelang	2,60	0,00	0,00	0,13	100,00
Kota Surakarta	0,70	0,00	0,00	0,18	100,00
Kota Salatiga	3,22	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Semarang	2,61	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Pekalongan	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kota Tegal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Prov. Jawa Tengah	14,31	0,29	0,53	0,06	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.6
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air
Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Jarak ke Tempat Penampungan Kotoran/Tinja			
	<10 m	≥ 10 m	Tidaktahu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab.Cilacap	26,82	70,65	2,53	100,00
Kab.Banyumas	20,60	74,74	4,66	100,00
Kab.Purbalingga	17,46	77,03	5,51	100,00
Kab.Banjarnegara	27,16	70,01	2,83	100,00
Kab.Kebumen	40,51	56,19	3,30	100,00
Kab.Purworejo	25,86	74,14	0,00	100,00
Kab.Wonosobo	4,22	93,47	2,31	100,00
Kab.Magelang	18,14	73,31	8,55	100,00
Kab.Boyolali	24,24	67,31	8,45	100,00
Kab.Klaten	39,56	58,70	1,70	100,00
Kab.Sukoharjo	25,30	73,11	1,59	100,00
Kab.Wonogiri	10,76	83,65	5,59	100,00
Kab.Karanganyar	21,64	73,68	4,68	100,00
Kab.Sragen	26,87	62,38	10,75	100,00
Kab.Grobogan	15,34	80,72	3,94	100,00
Kab.Blora	22,33	76,93	0,74	100,00
Kab.Rembang	10,73	69,86	19,41	100,00
Kab.Pati	36,07	59,95	3,98	100,00
Kab.Kudus	36,53	61,59	1,88	100,00
Kab.Jepara	20,83	76,56	2,62	100,00
Kab.Demak	14,52	48,40	37,08	100,00
Kab.Semarang	13,29	84,75	1,96	100,00
Kab.Temanggung	12,04	79,66	8,30	100,00
Kab.Kendal	14,91	75,39	9,70	100,00
Kab.Batang	17,87	73,59	8,54	100,00
Kab.Pekalongan	29,89	65,64	4,47	100,00
Kab.Pemalang	36,59	59,09	4,32	100,00
Kab.Tegal	34,20	60,95	4,85	100,00
Kab.Brebes	36,70	57,41	5,89	100,00
Kota Magelang	37,76	55,70	6,54	100,00
Kota Surakarta	47,78	48,02	4,20	100,00
Kota Salatiga	20,70	70,60	8,70	100,00
Kota Semarang	9,55	76,84	13,61	100,00
Kota Pekalongan	49,96	42,44	7,60	100,00
Kota Tegal	21,13	78,87	0,00	100,00
Propinsi Jateng	24,67	69,91	5,42	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.7
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan
Cara memperoleh Air Minum, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Cara Memperoleh Air Minum		
	Membeli	Tidak Membeli	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab.Cilacap	34,97	65,03	100,00
Kab.Banyumas	37,38	62,62	100,00
Kab.Purbalingga	26,00	74,00	100,00
Kab.Banjarnegara	10,58	89,42	100,00
Kab.Kebumen	20,12	79,88	100,00
Kab.Purworejo	20,73	79,27	100,00
Kab.Wonosobo	56,98	43,02	100,00
Kab.Magelang	30,53	69,47	100,00
Kab.Boyolali	26,33	73,67	100,00
Kab.Klaten	28,53	71,47	100,00
Kab.Sukoharjo	41,39	58,61	100,00
Kab.Wonogiri	25,18	74,82	100,00
Kab.Karanganyar	39,91	60,09	100,00
Kab.Sragen	59,83	40,17	100,00
Kab.Grobogan	62,93	37,07	100,00
Kab.Blora	39,77	60,23	100,00
Kab.Rembang	71,82	28,18	100,00
Kab.Pati	54,73	45,27	100,00
Kab.Kudus	40,01	59,99	100,00
Kab.Jepara	26,58	73,42	100,00
Kab.Demak	84,66	15,34	100,00
Kab.Semarang	40,28	59,72	100,00
Kab.Temanggung	32,22	67,78	100,00
Kab.Kendal	54,57	45,43	100,00
Kab.Batang	32,90	67,10	100,00
Kab.Pekalongan	30,23	69,77	100,00
Kab.Pemalang	41,58	58,42	100,00
Kab.Tegal	48,18	51,82	100,00
Kab.Brebes	44,90	55,10	100,00
Kota Magelang	79,02	20,98	100,00
Kota Surakarta	63,99	36,01	100,00
Kota Salatiga	72,87	27,13	100,00
Kota Semarang	81,31	18,69	100,00
Kota Pekalongan	49,90	50,10	100,00
Kota Tegal	91,00	9,00	100,00
Propinsi Jateng	43,87	56,13	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.8
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota
dan Sumber Penerangan Utama, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan Utama Bangunan Tempat Tinggal			
	Listrik PLN	Listrik non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Cilacap	99,80	0,00	0,20	100,00
Kab. Banyumas	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Purbalingga	99,83	0,00	0,17	100,00
Kab. Banjarnegara	99,85	0,00	0,15	100,00
Kab. Kebumen	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Purworejo	99,43	0,00	0,57	100,00
Kab. Wonosobo	99,88	0,00	0,12	100,00
Kab. Magelang	99,68	0,00	0,32	100,00
Kab. Boyolali	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Klaten	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Sukoharjo	99,81	0,00	0,19	100,00
Kab. Wonogiri	99,90	0,00	0,10	100,00
Kab. Karanganyar	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Sragen	99,76	0,00	0,24	100,00
Kab. Grobogan	99,78	0,00	0,22	100,00
Kab. Blora	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Rembang	99,84	0,16	0,00	100,00
Kab. Pati	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Kudus	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Jepara	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Demak	99,91	0,09	0,00	100,00
Kab. Semarang	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Temanggung	99,88	0,00	0,12	100,00
Kab. Kendal	99,92	0,00	0,08	100,00
Kab. Batang	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Pekalongan	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Pemasang	99,66	0,18	0,16	100,00
Kab. Tegal	100,00	0,00	0,00	100,00
Kab. Brebes	100,00	0,00	0,00	100,00
Kota Magelang	99,78	0,00	0,22	100,00
Kota Surakarta	100,00	0,00	0,00	100,00
Kota Salatiga	100,00	0,00	0,00	100,00
Kota Semarang	100,00	0,00	0,00	100,00
Kota Pekalongan	99,85	0,00	0,15	100,00
Kota Tegal	100,00	0,00	0,00	100,00
Prov. Jawa Tengah	99,91	0,01	0,08	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.9
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan
Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar		
	Sendiri	Bersama	MCK Umum
(1)	(2)	(3)	(7)
Kab.Cilacap	82,18	4,49	0,35
Kab.Banyumas	79,57	5,95	3,44
Kab.Purbalingga	79,98	6,27	0,08
Kab.Banjarnegara	70,11	5,52	2,92
Kab.Kebumen	84,75	8,41	1,27
Kab.Purworejo	82,97	7,62	0,54
Kab.Wonosobo	78,77	5,85	13,58
Kab.Magelang	77,37	8,47	4,48
Kab.Boyolali	81,87	12,10	0,73
Kab.Klaten	82,65	12,25	0,41
Kab.Sukoharjo	81,57	13,88	1,76
Kab.Wonogiri	91,89	4,53	0,00
Kab.Karanganyar	89,26	6,58	0,32
Kab.Sragen	84,17	10,40	0,40
Kab.Grobogan	78,21	10,19	0,10
Kab.Blora	79,35	10,96	0,33
Kab.Rembang	85,62	4,64	0,82
Kab.Pati	90,70	3,44	0,44
Kab.Kudus	93,07	4,81	0,52
Kab.Jepara	76,78	12,10	1,96
Kab.Demak	83,65	8,66	0,48
Kab.Semarang	87,85	9,16	0,82
Kab.Temanggung	84,70	6,15	4,20
Kab.Kendal	79,94	7,19	0,79
Kab.Batang	77,73	4,79	0,94
Kab.Pekalongan	73,65	12,67	1,42
Kab.Pemalang	73,24	8,10	1,51
Kab.Tegal	75,34	13,76	0,47
Kab.Brebes	75,17	10,76	0,28
Kota Magelang	83,32	10,50	4,16
Kota Surakarta	71,92	17,91	10,13
Kota Salatiga	82,74	17,07	0,16
Kota Semarang	86,04	10,42	2,31
Kota Pekalongan	77,67	11,42	7,77
Kota Tegal	65,57	29,69	1,26
Propinsi Jateng	81,13	8,90	1,69

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.9 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar		
	Ada, Tidak Digunakan	Tidak Ada	Total
(1)	(5)	(6)	(7)
Kab.Cilacap	0,10	12,88	100,00
Kab.Banyumas	0,00	11,04	100,00
Kab.Purbalingga	0,10	13,57	100,00
Kab.Banjarnegara	0,12	21,33	100,00
Kab.Kebumen	0,00	5,57	100,00
Kab.Purworejo	0,45	8,42	100,00
Kab.Wonosobo	0,00	1,80	100,00
Kab.Magelang	0,08	9,60	100,00
Kab.Boyolali	0,08	5,22	100,00
Kab.Klaten	0,00	4,69	100,00
Kab.Sukoharjo	0,02	2,77	100,00
Kab.Wonogiri	0,00	3,58	100,00
Kab.Karanganyar	0,07	3,77	100,00
Kab.Sragen	0,00	5,03	100,00
Kab.Grobogan	0,00	11,50	100,00
Kab.Blora	0,11	9,25	100,00
Kab.Rembang	0,00	8,92	100,00
Kab.Pati	0,00	5,42	100,00
Kab.Kudus	0,00	1,60	100,00
Kab.Jepara	0,00	7,16	100,00
Kab.Demak	0,15	7,06	100,00
Kab.Semarang	0,00	2,17	100,00
Kab.Temanggung	0,00	4,95	100,00
Kab.Kendal	0,18	11,90	100,00
Kab.Batang	0,00	16,54	100,00
Kab.Pekalongan	1,22	11,04	100,00
Kab.Pemalang	0,12	17,03	100,00
Kab.Tegal	0,09	10,34	100,00
Kab.Brebes	0,05	13,74	100,00
Kota Magelang	0,00	2,02	100,00
Kota Surakarta	0,00	0,04	100,00
Kota Salatiga	0,00	0,03	100,00
Kota Semarang	0,00	1,23	100,00
Kota Pekalongan	0,40	2,74	100,00
Kota Tegal	0,00	3,48	100,00
Propinsi Jateng	0,08	8,20	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.10
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset,
Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset			Total
	Leher Angsa	Plengsengan Tertutup/ Tanpa Tutup	Cemplung/ Cubluk	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Kab.Cilacap	93,21	0,96	5,83	100,00
Kab.Banyumas	94,71	1,74	3,55	100,00
Kab.Purbalingga	98,53	0,39	1,08	100,00
Kab.Banjarnegara	88,19	7,83	3,98	100,00
Kab.Kebumen	97,59	0,75	1,66	100,00
Kab.Purworejo	92,93	1,59	5,48	100,00
Kab.Wonosobo	81,71	14,17	4,12	100,00
Kab.Magelang	96,67	2,26	1,07	100,00
Kab.Boyolali	97,06	0,96	1,98	100,00
Kab.Klaten	99,70	0,30	0,00	100,00
Kab.Sukoharjo	99,39	0,45	0,16	100,00
Kab.Wonogiri	96,71	0,44	2,85	100,00
Kab.Karanganyar	98,88	1,12	0,00	100,00
Kab.Sragen	92,63	0,58	6,79	100,00
Kab.Grobogan	90,44	2,10	7,46	100,00
Kab.Blora	86,36	0,53	13,11	100,00
Kab.Rembang	98,25	0,00	1,75	100,00
Kab.Pati	96,53	1,33	2,14	100,00
Kab.Kudus	99,36	0,09	0,55	100,00
Kab.Jepara	84,86	2,32	12,82	100,00
Kab.Demak	98,20	0,58	1,22	100,00
Kab.Semarang	98,24	0,23	1,53	100,00
Kab.Temanggung	91,50	5,42	3,08	100,00
Kab.Kendal	92,83	4,36	2,81	100,00
Kab.Batang	98,16	0,73	1,11	100,00
Kab.Pekalongan	99,81	0,13	0,06	100,00
Kab.Pemalang	95,84	2,03	2,13	100,00
Kab.Tegal	99,50	0,30	0,20	100,00
Kab.Brebes	97,56	1,46	0,98	100,00
Kota Magelang	99,26	0,00	0,74	100,00
Kota Surakarta	99,71	0,29	0,00	100,00
Kota Salatiga	99,44	0,35	0,21	100,00
Kota Semarang	99,07	0,43	0,50	100,00
Kota Pekalongan	99,60	0,25	0,15	100,00
Kota Tegal	98,57	1,43	0,00	100,00
Provinsi Jateng	95,55	1,58	2,87	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.11
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat
Pembuangan Akhir Tinja, Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja		
	Tangki Septik	IPAL	Kolam/Sawah/ Sungai/Danau/ Laut
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab.Cilacap	83,30	0,16	10,97
Kab.Banyumas	77,21	0,14	20,31
Kab.Purbalingga	82,30	0,00	12,93
Kab.Banjarnegara	28,66	0,57	38,23
Kab.Kebumen	93,29	0,00	3,07
Kab.Purworejo	80,33	0,00	16,94
Kab.Wonosobo	10,94	0,46	39,28
Kab.Magelang	83,87	0,00	10,22
Kab.Boyolali	92,07	0,25	1,57
Kab.Klaten	96,42	0,67	2,91
Kab.Sukoharjo	98,15	1,03	0,50
Kab.Wonogiri	87,46	0,18	0,17
Kab.Karanganyar	94,68	0,23	0,44
Kab.Sragen	85,70	2,31	3,95
Kab.Grobogan	86,76	0,37	1,27
Kab.Blora	83,19	2,15	0,26
Kab.Rembang	97,78	0,13	0,34
Kab.Pati	87,42	0,18	2,33
Kab.Kudus	88,96	0,22	4,83
Kab.Jepara	57,09	0,54	1,31
Kab.Demak	93,74	0,00	3,91
Kab.Semarang	78,89	0,18	2,54
Kab.Temanggung	46,48	0,37	23,93
Kab.Kendal	80,43	0,00	8,19
Kab.Batang	58,47	0,00	13,10
Kab.Pekalongan	87,98	1,26	8,14
Kab.Pemalang	83,68	0,24	7,34
Kab.Tegal	81,17	2,32	14,01
Kab.Brebes	83,79	0,00	12,67
Kota Magelang	82,95	4,57	12,48
Kota Surakarta	74,04	20,52	4,88
Kota Salatiga	97,64	0,23	1,22
Kota Semarang	96,00	0,69	2,90
Kota Pekalongan	91,29	0,52	6,11
Kota Tegal	94,81	0,00	5,19
Propinsi Jateng	81,78	0,82	8,11

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.11 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Tempat Pembuangan Akhir Tinja		
	Lubang Tanah	Pantai/ TanahLapang/ Kebun/ Lainnya	Total
(1)	(5)	(6)	(7)
Kab.Cilacap	5,34	0,23	100,00
Kab.Banyumas	2,34	0,00	100,00
Kab.Purbalingga	4,77	0,00	100,00
Kab.Banjarnegara	30,56	1,98	100,00
Kab.Kebumen	2,87	0,77	100,00
Kab.Purworejo	2,73	0,00	100,00
Kab.Wonosobo	48,80	0,52	100,00
Kab.Magelang	5,91	0,00	100,00
Kab.Boyolali	5,91	0,20	100,00
Kab.Klaten	0,00	0,00	100,00
Kab.Sukoharjo	0,16	0,16	100,00
Kab.Wonogiri	12,16	0,03	100,00
Kab.Karanganyar	4,65	0,00	100,00
Kab.Sragen	7,58	0,46	100,00
Kab.Grobogan	9,10	2,50	100,00
Kab.Blora	14,06	0,34	100,00
Kab.Rembang	1,75	0,00	100,00
Kab.Pati	10,07	0,00	100,00
Kab.Kudus	5,99	0,00	100,00
Kab.Jepara	40,57	0,49	100,00
Kab.Demak	1,63	0,72	100,00
Kab.Semarang	18,23	0,16	100,00
Kab.Temanggung	29,08	0,14	100,00
Kab.Kendal	11,21	0,17	100,00
Kab.Batang	27,98	0,45	100,00
Kab.Pekalongan	2,23	0,39	100,00
Kab.Pemalang	8,37	0,37	100,00
Kab.Tegal	2,04	0,46	100,00
Kab.Brebes	1,99	1,55	100,00
Kota Magelang	0,00	0,00	100,00
Kota Surakarta	0,53	0,03	100,00
Kota Salatiga	0,91	0,00	100,00
Kota Semarang	0,41	0,00	100,00
Kota Pekalongan	1,13	0,95	100,00
Kota Tegal	0,00	0,00	100,00
Propinsi Jateng	8,87	0,42	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 5.1
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab.Cilacap	74,88	77,08	76,07
Kab.Banyumas	78,89	67,27	75,08
Kab.Purbalingga	69,68	68,27	77,24
Kab.Banjarnegara	65,57	68,40	62,37
Kab.Kebumen	56,23	60,31	61,91
Kab.Purworejo	57,79	68,22	69,90
Kab.Wonosobo	88,43	87,61	88,08
Kab.Magelang	72,17	79,45	71,59
Kab.Boyolali	70,81	65,80	73,49
Kab.Klaten	76,09	72,06	71,22
Kab.Sukoharjo	81,00	82,74	81,63
Kab.Wonogiri	76,28	78,89	83,16
Kab.Karanganyar	85,38	77,10	81,92
Kab.Sragen	81,75	83,12	84,64
Kab.Grobogan	64,21	69,74	75,12
Kab.Blora	86,99	78,08	77,73
Kab.Rembang	88,44	80,04	90,18
Kab.Pati	74,74	77,26	79,54
Kab.Kudus	75,92	72,74	77,49
Kab.Jepara	75,05	69,74	79,26
Kab.Demak	79,85	80,85	82,89
Kab.Semarang	81,55	84,09	85,26
Kab.Temanggung	72,75	80,82	78,75
Kab.Kendal	86,11	84,25	86,54
Kab.Batang	73,74	71,04	82,32
Kab.Pekalongan	52,31	63,21	71,87
Kab.Pemalang	73,63	80,32	75,89
Kab.Tegal	72,29	74,94	75,68
Kab.Brebes	78,11	73,11	73,55
Kota Magelang	90,05	92,05	90,18
Kota Surakarta	88,00	84,11	83,30
Kota Salatiga	91,60	89,57	92,83
Kota Semarang	96,03	91,08	91,13
Kota Pekalongan	74,89	72,16	70,13
Kota Tegal	98,37	99,13	99,50
Propinsi Jateng	76,30	76,09	78,16

Sumber: Susenas 2018

Tabel 5.2
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Cilacap	67,34	72,74	72,14
Kab. Banyumas	67,00	65,88	66,15
Kab. Purbalingga	64,66	65,89	70,99
Kab. Banjarnegara	27,24	22,55	20,86
Kab. Kebumen	83,43	80,17	86,90
Kab. Purworejo	69,75	69,38	72,77
Kab. Wonosobo	18,71	11,60	9,24
Kab. Magelang	58,29	58,94	71,64
Kab. Boyolali	81,75	83,49	86,75
Kab. Klaten	85,90	84,89	91,98
Kab. Sukoharjo	94,25	91,93	94,30
Kab. Wonogiri	75,89	81,51	84,33
Kab. Karanganyar	94,26	94,25	90,96
Kab. Sragen	82,83	80,34	83,15
Kab. Grobogan	76,51	79,15	76,44
Kab. Blora	70,44	71,48	77,08
Kab. Rembang	79,58	80,17	88,37
Kab. Pati	83,28	80,59	82,46
Kab. Kudus	83,67	88,25	87,28
Kab. Jepara	48,16	55,68	51,22
Kab. Demak	80,86	82,68	86,32
Kab. Semarang	63,78	63,10	76,71
Kab. Temanggung	32,17	32,24	42,47
Kab. Kendal	70,11	70,99	69,29
Kab. Batang	49,92	51,05	48,25
Kab. Pekalongan	61,02	74,41	77,04
Kab. Pemasang	67,36	64,40	68,12
Kab. Tegal	70,42	74,27	74,26
Kab. Brebes	65,19	71,05	71,75
Kota Magelang	79,47	76,36	82,11
Kota Surakarta	83,54	83,20	84,84
Kota Salatiga	92,44	94,66	97,47
Kota Semarang	90,33	91,02	93,11
Kota Pekalongan	85,03	87,88	81,79
Kota Tegal	89,63	90,36	90,32
Prov. Jawa Tengah	70,66	71,84	74,19

Sumber: Susenas 2018

Tabel 5.3
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni
Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah, 2016 - 2018

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Cilacap	4,71	3,59	3,19
Kab. Banyumas	2,40	3,05	1,05
Kab. Purbalingga	3,34	3,12	2,76
Kab. Banjarnegara	3,55	4,70	3,34
Kab. Kebumen	4,56	3,19	1,43
Kab. Purworejo	7,12	3,73	3,32
Kab. Wonosobo	3,32	2,01	2,47
Kab. Magelang	7,80	3,56	3,26
Kab. Boyolali	5,20	4,62	2,77
Kab. Klaten	0,69	0,67	0,79
Kab. Sukoharjo	0,53	0,60	0,58
Kab. Wonogiri	2,51	2,34	1,82
Kab. Karanganyar	0,55	0,18	0,14
Kab. Sragen	4,12	3,25	2,35
Kab. Grobogan	12,33	8,95	8,41
Kab. Blora	4,58	8,22	7,47
Kab. Rembang	2,75	4,59	2,63
Kab. Pati	4,12	3,20	1,68
Kab. Kudus	0,66	1,03	0,18
Kab. Jepara	7,58	5,17	5,18
Kab. Demak	4,16	2,73	1,55
Kab. Semarang	2,83	2,34	1,16
Kab. Temanggung	4,82	3,27	2,63
Kab. Kendal	5,01	4,45	3,63
Kab. Batang	7,04	6,26	3,24
Kab. Pekalongan	4,44	3,24	1,31
Kab. Pemasang	7,18	1,98	5,46
Kab. Tegal	2,54	2,26	2,70
Kab. Brebes	2,56	3,48	2,16
Kota Magelang	0,72	0,62	0,13
Kota Surakarta	1,88	1,82	2,21
Kota Salatiga	0,31	0,58	0,28
Kota Semarang	0,63	0,94	0,50
Kota Pekalongan	0,43	0,69	0,36
Kota Tegal	0,45	0,15	0,00
Prov. Jawa Tengah	4,03	3,24	2,59

Sumber: Susenas 2018

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). Indonesia: Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No.7. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia.1999. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Sekretariat Kabinet RI.Jakarta

_____. (2017). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/- Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/11/3.-PilarPembangunan-Lingkungan-1.pdf> pada tanggal 8 Maret 2018.

_____. (2017). Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Goal-1.pdf> pada tanggal 8 Maret 2018.

_____. (2017). Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2017/11/Goal-6.pdf> pada tanggal 8 Maret 2018.

_____. (2017). Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan. Diakses dari <http://sdgs.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2017/11/Goal-11.pdf> pada tanggal 8 Maret 2018

www.flaticon.com



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id

ISSN 2407-3431



9 772407 343004